

SKRIPSI

**PENGARUH PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP
KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH**



Disusun Oleh:

**VERY GUNAWAN
NIM. 170604021**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Very Gunawan
NIM : 170604021
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 November 2023

Yang Menyatakan



Very Gunawan

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
Pengaruh Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Indeks Pembangunan
Manusia terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh

Disusun Oleh:

Very Gunawan
NIM: 170604021

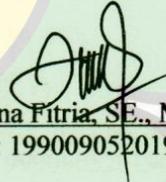
Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah
memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Hafiizh Maulana, SP., S.H.I. M.E
NIDN: 2006019002

Pembimbing II



Ana Fitria, SE., M. Sc
NIP : 199009052019032019

Mengetahui,
A R - R Ketua Prodi, Y



Cut Dian Fitri, SE. M. Si, Ak. CA
NIP : 198307092014032002

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Pengaruh Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Indeks Pembangunan
Manusia terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh.**

Very Gunawan
NIM: 170604021

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2023 M
13 Jumadil Akhir 1445 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

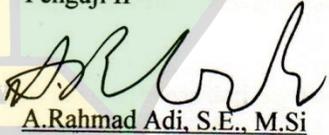

Hafiih Maulana, SP., S.H.I. M.E
NIDN: 2006019002


Ana Fitria, SE., M. Sc
NIP : 199009052019032019

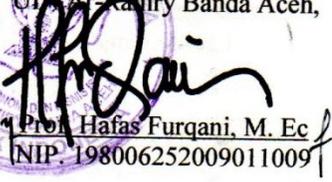
Penguji I

Penguji II


Cut Dian Fitri, SE. M.Si, Ak. CA
NIP : 198307092014032002


A. Rahmad Adi, S.E., M.Si
NIDN: 2022118501

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Prof. Hafas Furqani, M. Ec
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Very Gunawan
NIM : 170604021
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmu Ekonomi
E-mail : 170604021@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Pengaruh Penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Indeks
Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh.**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Desember 2023

Mengetahui

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Very Gunawan
Nim. 170604021

Hafizh Maulana, SP., S.H.I. M.E
NIDN. 2006019002

Ana Fitria, SE., M. Sc
NIP. 199009052019032019

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT., atas berkat dan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul ***"Pengaruh Penggunaan Dana Otonomi Khusus Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh"***. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., yang dengan hadirnya penelitian ini semoga menjadi bagian menyampaikan sunnahnya dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini dilakukan dengan penuh perjuangan sehingga didalamnya tidak mungkin tidak ada dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dan terkait baik secara akademis maupun non akademis.

Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajian kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Dimana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemuliaan seperti yang sedang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Hafas Furqani, M.Ec. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Cut Dian Fitri, SE., M.Si.,Ak. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Ana Fitria, M.Sc. Sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium, serta staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis *Islam* UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Hafiizh Maulana, SP., S.H.I.,M.E dosen pembimbing I dan Ana Fitria, S.E., M.Sc. dosen pembimbing II yang tidak bosan-bosannya memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan Proposal Skripsi ini. Sehingga Proposal Skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas bimbingan dan motivasi selama ini.
5. Cut Dian Fitri, SE., M.Si.,Ak. selaku penguji I dan A.Rahmad Adi, S.E., M.Si. penguji II yang telah membantu jalannya sidang dan telah memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini dan seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

7. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda Rusni dan Ayahanda Ali Basyah, yang selalu memberikan do'a yang tiada henti, kasih sayang, semangat dan dorongan moril serta materil kepada ananda dalam menempuh pendidikan hingga saat ini.
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan Letting 17 Ilmu Ekonomi yang telah mendukung dan memberikan motivasi selama perkuliahan berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin.

Aamiin yaa Rabbal 'Alamin...

Banda Aceh, 28 November 2023

جامعة الرانيري Penulis

A R - R A N I R Y

Very Gunawan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau

diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُونَ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudāh al-atfāl/ raudatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Vey Gunawan
NIM : 170604021
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu
Ekonomi
Judul : Pengaruh Penggunaan Dana Otonomi
Khusus Dan Indeks Pembangunan
Manusia Terhadap Kemiskinan Di
Provinsi Aceh
Pembimbing I : Hafiih Maulana, SP.,S.H.I.,M.E
Pembimbing II : Ana Fitria. SE.,M.Sc

Dana Otonomi Khusus dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh dalam rentang tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi, sehingga menjadi salah-satu indikasi pentingnya dilakukan kajian terhadap kemiskinan di 23 Kab/Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dana otomi khusus dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini adalah data Otsus dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang signifikan dan berarah negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Selain itu Otsus dan tingkat IPM secara bersama-sama berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, dan hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut saling berhubungan dalam menyumbang pada kondisi kemiskinan di wilayah

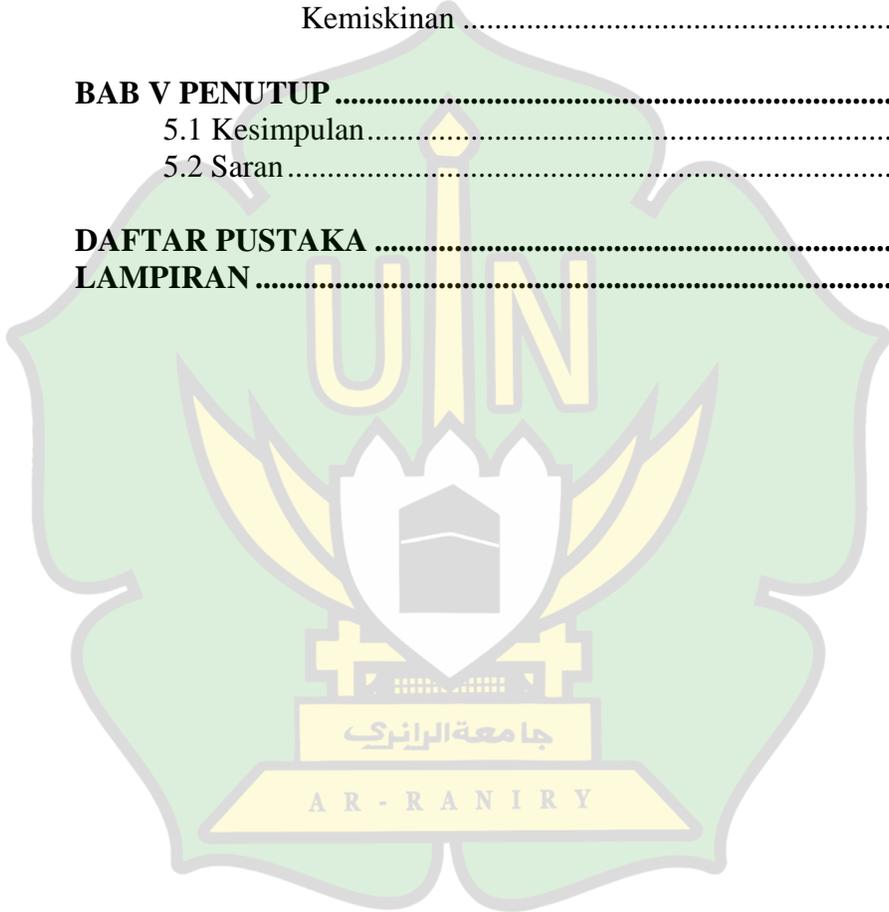
Kata Kunci: Dana Otsus, IPM, Kemiskinan

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	14
2.1 Teori Kemiskinan	14
2.1.1 Pengetian Kemiskinan	14
2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan	15
2.1.3 Kategori Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik.....	17
2.1.4 Macam-Macam Kemiskinan.....	18
2.1.5 Paradigma Pembangunan dan Kemiskinan	20
2.2 Konsep Otonomi Khusus.....	21
2.2.1 Manfaat Dana Otonomi Khusus	22
2.2.2 Daerah Penerima Dana Otonomi Khusus	22
2.2.3 Aceh ditetapkan sebagai penerima Dana Otonomi Khusus.....	23
2.2.4 Sejarah Otonomi Khusus Aceh.....	23
2.2.5 Implementasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus pada Realisasi Anggaran	27
2.2.6 Peraturan Gubernur.....	28
2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia	30
2.2.8 Pembangunan Manusia di tingkat Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh	31

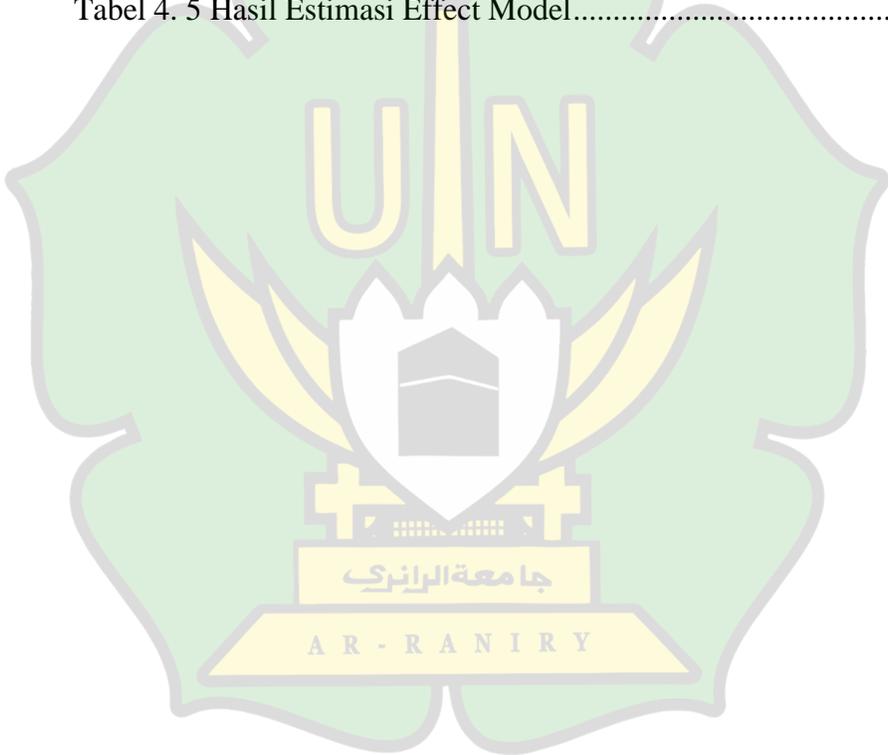
2.3 Desentralisasi Fiskal.....	32
2.4 Penelitian Terdahulu.....	33
2.4.1 Matrik Penelitian Terdahulu	33
2.5 Hubungan Antar Variabel.....	39
2.5.1 Pengaruh Dana Otsus Terhadap Belanja Kemiskinan	39
2.5.2 Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan	40
2.5.3 Pengaruh Otsus dan IPM Terhadap Kemiskinan	41
2.6 Kerangka Pemikiran	42
2.7 Hipotesis	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
3.2 Sumber Data Penelitian	44
3.3 Variabel Penelitian	45
3.3.1 Klasifikasi Variabel Penelitian	45
3.3.2 Variabel Dependen	45
3.3.3 Variabel Independen	46
3.4 Teknik pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.5 Uji Asumsi Klasik	50
3.5.1 Uji Normalitas	50
3.5.2 Uji Autokorelasi	51
3.5.3 Uji Heterokedastisitas	52
3.5.4 Uji Multikolenaritas	52
3.6 Metode Analisis Data	52
3.6.1 Analisis Regresi Linear berganda	52
3.6.2 Uji Determinasi (R^2)	53
3.7 Pengujian Hipotesis	53
3.7.1 Uji Parsial.....	54
3.7.2 Uji Silmutan	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	56
4.2 Analisis Deskriptif Statistik.....	57
4.2.1 Kemiskinan	58
4.2.2 Dana Otonomi Khusus.....	60
4.2.3 Indeks Pembangunan Manusia	62

4.3 Analisis Data Inferensial	64
4.4 Analisis Data Panel	66
4.5 Pengujian Hipotesis	68
4.6 Hasil dan Pembahasan	71
4.6.1 Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan ..	71
4.6.2 Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan	72
BAB V PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81



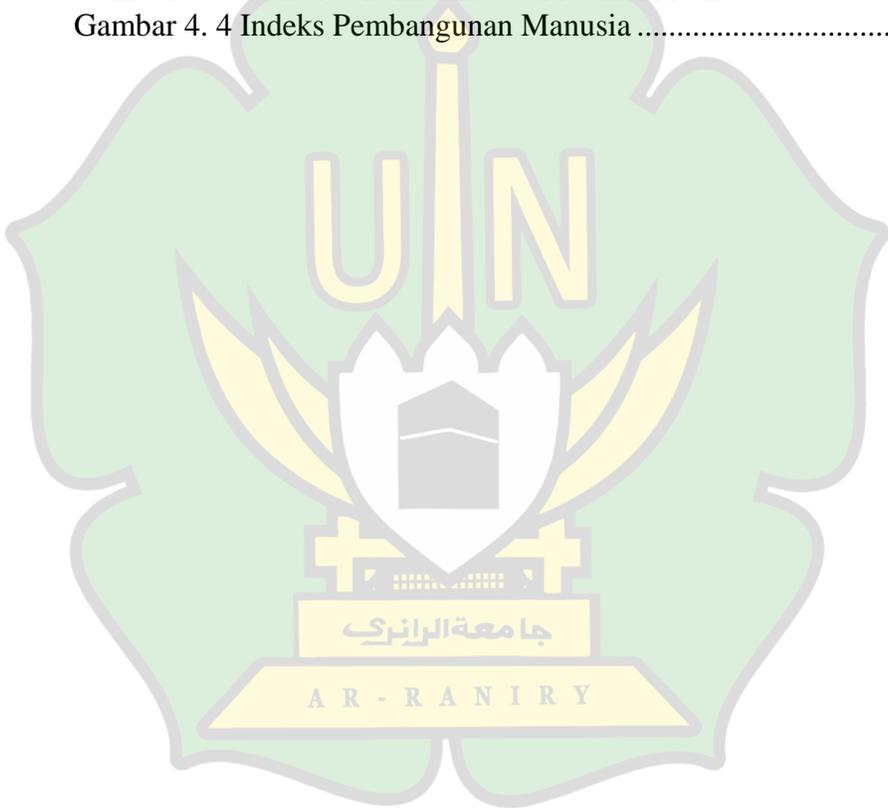
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik..	17
Tabel 2. 2 Program Kegiatan Yang Tercantum Pasal 7	29
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	46
Tabel 4. 1 Statistik Deskriptif.....	58
Tabel 4. 2 Penentuan Pemilihan Model.....	65
Tabel 4. 3 Hasil Pemilihan Model.....	65
Tabel 4. 4 Hasil Etimasi Random Effect Model.....	67
Tabel 4. 5 Hasil Estimasi Effect Model.....	69



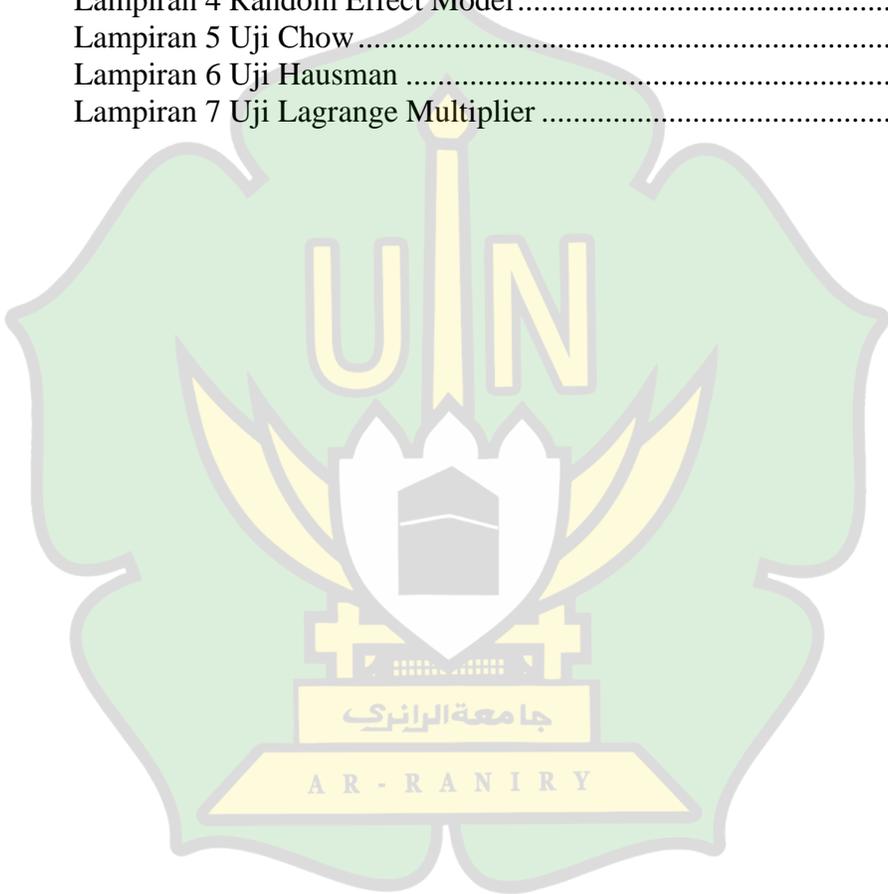
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Presentasi Kemiskinan Aceh	3
Gambar 1. 2 Dana Otomi Khusus.....	7
Gambar 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh	9
Gambar 4. 1 Peta Provinsi Aceh.....	57
Gambar 4. 2 Kemiskinan Di Provinsi Aceh	59
Gambar 4. 3 Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh.....	61
Gambar 4. 4 Indeks Pembangunan Manusia	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Otsus Dan Indeks Pembangunan Manusia	81
Lampiran 2 Common Effect Model.....	83
Lampiran 3 Fixed Effect Model	83
Lampiran 4 Random Effect Model.....	84
Lampiran 5 Uji Chow	85
Lampiran 6 Uji Hausman	86
Lampiran 7 Uji Lagrange Multiplier	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

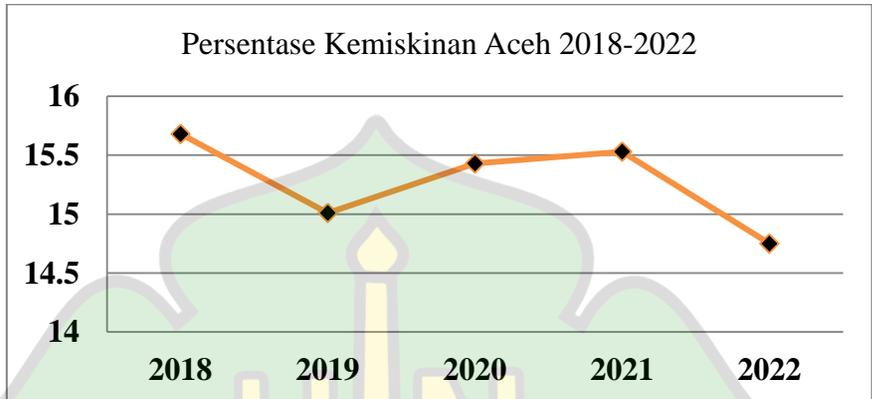
Kemiskinan merupakan permasalahan global, yang dihadapi oleh negara negara di seluruh dunia senantiasa menghadapi dan memperhatikan permasalahan tersebut menjadi dua aspek, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder adalah aspek yang berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan juga dapat diartikan suatu kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah oleh seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai tata nilai atau norma yang berlaku Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi jumlah penduduk Indonesia pada Desember 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia menembus angka 26,36 juta orang, meningkat 0,20 juta orang terhadap maret 2022 dan menurun 0,14 juta orang terhadap September 2021 (Nugroho, 2018).

Menurut banyak pakar kemiskinan, faktor ekonomi sering kali disebut sebagai penyebab utama munculnya kemiskinan. Namun pada kenyataannya, faktor politik adalah faktor yang paling dominan memainkan peranan bagi munculnya penduduk miskin baru akibat berbagai kebijakan yang dibuat selain itu, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor infrastruktur yang terbatas

menjadi penyebab makin banyaknya kemiskinan di Indonesia. Meskipun memiliki sumber daya alam yang berlimpah namun apabila hidup di daerah yang tertinggal dengan infrastruktur yang terbatas maka besar kemungkinan individu tersebut akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan (Ikhsan, 2020).

Aceh merupakan salah satu Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia. Pada tahun 2022 Provinsi Aceh secara tingkat Nasional menempati peringkat ke-6 tertinggi setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh mencapai 819 ribu jiwa dan tertinggi di Sumatera. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Dengan menyerahkan kewenangan fiskal kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan besar untuk merencanakan, dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerahnya. Pemerintah daerah harus lebih peka pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang kewenangan masih mengalami kendala di daerah sehingga perlu di evaluasi agar dapat mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal mampu mengurangi kemiskinan di daerahnya (Sakinah, 2021).

Gambar 1. 1
Prentasi kemiskinan Aceh 2018-2022



Sumber:Badan Pusat Statistik (2022)

Pada bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh sebanyak 806,82 ribu orang (14,75 persen) berkurang sebanyak 43,4 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2021 yang jumlahnya 850,26 ribu orang (15,53 persen) disebabkan pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020. Dengan ini menjadikan Provinsi Aceh peringkat ketujuh daerah dengan persentase tingkat kemiskinan yang tinggi setelah Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Bengkulu. Jika dihitung dari peringkat dengan persentase kemiskinannya di wilayah Pulau Sumatera, Provinsi Aceh menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Bengkulu (BPS, 2022).

Otonomi Khusus (otsus) merupakan bagian dari resolusi konflik Aceh yang berkepanjangan membuat Aceh menjadi pusat

perhatian dunia serta upaya perdamaian yang dibarengi dengan semangat rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca bencana tsunami tahun 2004 silam. Berawal dari penandatanganan kesepakatan damai MoU Helsinki antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 dan legalnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, seluruh komponen negara berbondong-bondong memusatkan perhatian dan potensi bangsa untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Aceh seperti sedia kala, bahkan harus jauh lebih baik. Salah satu upaya konkret dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Aceh dengan mengalokasikan dana otonomi khusus. Perlakuan kebijakan asimetris ini dilihat salah satunya karena faktor sejarah, politik, konflik, dan budaya (Ikhsan, 2014).

Ketimpangan ekonomi yang berujung pada konflik disintegrasi terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan lepasnya timor-timur dari NKRI. Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan desentralisasi yang asimetris seperti di Aceh dan Papua berupa otonomi khusus. Menurut (Hanum 2001:109) terdapat dua manfaat yang dapat diperoleh dari pemberlakuan desentralisasi asimetris. Pertama, sebagai solusi bagi kemungkinan terjadinya konflik etnis, atau konflik fisik lainnya. Kedua, sebagai respon demokratis dan damai terhadap keluhan atau masalah yang dihadapi kelompok kaum minoritas (Murthala, 2015).

Jumlah dana otonomi khusus yang akan diterima Provinsi Aceh sampai tahun 2027 sebesar 100 triliun. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2022 adalah sebesar Rp 95,9 Triliun. Dari total rencana alokasi dana otonomi khusus Aceh Rp. 100 triliun, tersisa 5 triliun untuk jangka waktu penerapan 11 tahun. Besarnya dana yang diterima Pemerintah Aceh tidak lantas membuat Aceh jauh lebih hebat dan lebih makmur dibandingkan daerah lain. Oleh karenanya harus dilakukan evaluasi agar sisa dana otonomi khusus Aceh yang tersisa benar-benar dapat membuat landasan yang kuat bagi Aceh agar bisa mandiri disaat tidak ada lagi dana otonomi khusus (Iriansyah, 2016).

Provinsi Aceh memiliki wilayah 23 kabupaten/kota, dengan total dana otonomi khusus yang dimiliki, maka dana tersebut wajib disalurkan ke setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh. Diharapkan dengan adanya dana otonomi khusus tersebut dapat membantu perekonomian yang ada di setiap kabupaten/kota, terutama untuk mensejahterakan masyarakat.

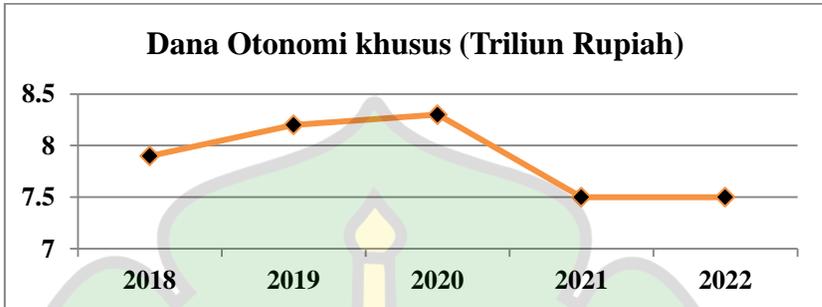
Beberapa permasalahan yang muncul adalah mengenai kewenangan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana otonomi khusus, sesuai Pasal 179 ayat 2. Dengan tegas menyebutkan sumber pendapatan daerah, baik di Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya berasal dari dana otonomi khusus. Namun, secara administratif, UUPA memberikan kewenangan pada tinsgkat Provinsi, sehingga memberikan kesan bahwa pemerintahan Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan

dalam pengelolaan dana otonomi khusus (Fahlevi, 2020).

Permasalahan kedua adalah dana otonomi khusus yang diterima oleh Provinsi Aceh tiap tahunnya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masih banyak kebijakan pemerintah Aceh dalam penggunaan dana tersebut lebih mementingkan pembangunan kantor yang megah dan kepentingan elit politik partai lokal di Aceh sebagai mayoritas tunggal. Sedangkan program pembangunan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat masih minim.

Perekonomian di Aceh bisa dilihat dengan besarnya pertumbuhan perkapita melalui pendapatan maupun pengeluaran. Dalam penelitian ini penulis ingin mengukurnya dengan menggunakan pengeluaran perkapita. Pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga baik makanan maupun non-makanan selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk (BPS, 2022).

Gambar 1. 2
Dana Otonomi Khusus dari Tahun 2018-2022



Sumber: Bappeda Aceh (2022)

Pada tahun 2018 Aceh menerima dana otsus sebesar Rp 7,8 Triliun yang terus meningkat setiap tahunnya, namun terjadi penurunan penerimaan Otsus pada tahun 2021-2022 dari Rp 8,2 Triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 7,5 Triliun. Dana otsus yang sudah diterima merupakan jumlah yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Otonomi khusus Aceh dipandang dapat mengurangi kemiskinan dengan lebih cepat apabila didorong oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Otonomi khusus di Aceh akan meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya karena pemerintah di daerah lebih dekat dengan warga daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah di daerah diharapkan memiliki informasi yang akurat dan bisa menyelesaikan persoalan dengan lebih cepat. Penelitian ini difokuskan terhadap dampak dari pelaksanaan otonomi

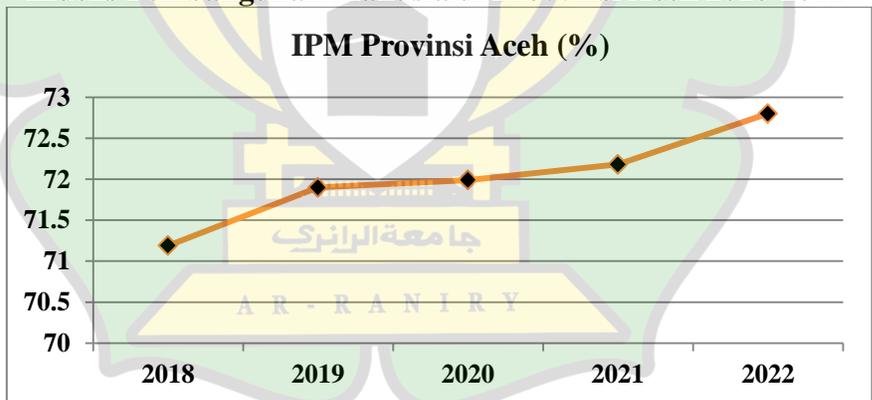
khusus di Aceh yang telah berjalan selama 15(Lima belas) tahun terutama terhadap pengurangan kemiskinan sebagai kosekuensi dari kontruksi otonomi khusus di Aceh yaitu pengurangan kemiskinan, selain itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah penerapan otonomi khusus di Aceh mampu untuk mensejahterakan masyarakat.

IPM merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM didasarkan pada pendekatan 3 dimensi dasar. Parameter ini meliputi umur panjang, kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang bermartabat. Ketiga dimensi ini sangat luas karena berhubungan dengan banyak faktor. Harapan hidup saat lahir digunakan untuk mengukur indikator kesehatan. Ini juga mengukur tingkat pengetahuan menggunakan kombinasi indikator literasi dan rata-rata lama belajar. Dalam mengukur dimensi penghidupan yang layak, daya beli masyarakat digunakan untuk berbagai kebutuhan dasar yang ditinjau dari segi pengeluaran rata-rata per kapita dengan pendekatan pendapatan yang mencerminkan perolehan pembangunan untuk kehidupan yang layak (BPS, 2022).

IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan 4 ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM yang rendah akan menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja. Produktivitas

yang rendah menyebabkan pendapatan yang lebih rendah, yang menyebabkan sejumlah besar orang miskin. Saat ini pembangunan manusia diukur dengan menggunakan Human Development Index (HDI), yang merupakan indeks komprehensif untuk mengukur kualitas pembangunan manusia. IPM sebagai indikator untuk mengukur pembangunan daerah harus berkorelasi positif dengan status kemiskinan daerah. Hal ini dikarenakan daerah tersebut diharapkan memiliki IPM yang tinggi sehingga diharapkan kualitas hidup masyarakatnya juga tinggi, atau nilai IPM yang tinggi dapat dikatakan menunjukkan rendahnya tingkat kemiskinan di masyarakat.

Gambar 1. 3
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh 2018-2022



Sumber: (BPS, 2022)

Pembangunan manusia di Provinsi Aceh terus mengalami kemajuan dan peningkatan pada periode 2018 hingga 2022. Selama 2018-2022 IPM Provinsi Aceh rata-rata meningkat sebesar 0,68

persen per tahun, dari 67,09 pada tahun 2018 menjadi 72,80 pada tahun 2022. Pada periode 2021-2022, IPM Provinsi Aceh tumbuh sebesar 0,86 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan pada periode 2020-2021 yang tumbuh sebesar 0,26 persen. Sejak tahun 2018, status pembangunan manusia Provinsi Aceh meningkat dari level sedang menjadi tinggi. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19, peningkatan IPM Provinsi Aceh sudah kembali membaik pada tahun 2021 hingga tahun 2022 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (BPS, 2022).

Berdasarkan latar belakang penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh penggunaan Dana Otonomi Khusus dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Otsus Aceh berpengaruh terhadap kemiskinan?
2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia Aceh berpengaruh terhadap kemiskinan?
3. Apakah Dana Otonomi khusus dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pengaruh Dana otsus terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.
2. Untuk melihat pengaruh Indeks pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.
3. Untuk melihat pengaruh Dana Otonomi khusus dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoretis, praktis dan kebijakan.

1. Secara Teoretis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang akademik dalam hal pengaruh dana otonomi khusus dan IPM terhadap kemiskinan dengan serta menambah informasi dan referensi bacaan serta bahan masukan yang berguna untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada pengelolaan Dana Otonomi khusus dan Indeks pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi

Aceh.

3. Secara kebijakan

Bagi pemerintah Aceh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengelola dana otonomi khusus, serta meningkatkan IPM untuk mengurangi Kemiskinan.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam suatu penelitian untuk penulisan karya tulis ilmiah tentu sangat diperlukan adanya bentuk sistematika penulisan yang baik dan tepat. Dalam hal penulisan karya ilmiah ini, sebagaimana diamanatkan dalam Buku Petunjuk dan Pedoman Penulisan Skripsi yang telah diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis dapat menyusun sistematika penulisan untuk Proposal Skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang standar karya tulis ilmiah, yaitu menerangkan alasan kenapa masalah tersebut layak untuk dijadikan sebuah penelitian. Selanjutnya mengidentifikasi masalah-masalah umum yang berkaitan dengan judul penelitian dan membuat satu pembatasan dan rumusan dari identifikasi masalah tersebut agar penelitian menjadi lebih terarah. Terakhir menerangkan tujuan dan manfaat dari penelitian serta menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori mengurai tentang teori-teori yang mendukung penelitian ini, membahas hasil penelitian terdahulu yang serupa serta memuat kerangka penelitian dan hipotesis penelitian yang berkaitan dengan dana otsus dan IPM terhadap kemiskinan Aceh.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini dibahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian “Dampak evaluasi dana Otonomi khusus terhadap kemiskinan Aceh”. Pada Bab ini dibahas mengenai sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian deskripsi data berisi serangkaian data yang berhasil dikumpulkan, baik data pendukung seperti latar belakang lembaga, instansi yang diteliti, struktur organisasi dan sebagainya serta data utama yang diperlukan untuk menguji hipotesis. Yang mana data-data tersebut harus dideskripsikan secara sistematis. Serta bagian pembahasan berisi tentang hasil penelitian sesuai dengan acuan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Bagian pembahasan ini memperlihatkan ketajaman dan keluasan wawasan penulis mengenai permasalahan dana otsus, IPM dan Kemiskinan.

BAB IV: PENUTUP

Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberi satu kontribusi keilmuan, praktik dan kebutuhan, serta kesimpulan pengujian hipotesis dari hasil yang diperoleh, Saran yang menjelaskan keterbatasan penelitian yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kemiskinan

2.1.1 Pengetian Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan takkan pernah terhapuskan dari muka ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumber daya. Orang yang miskin tidak akan mampu melaksanakan kewajiban agama secara maksimal seperti halnya orang yang tidak miskin, kurang mampu melaksanakan berbagai fungsi sosial kemasyarakatan, tidak dapat mengenyam pendidikan yang baik, hidup yang layak, akses kesehatan yang berkualitas, dan lainnya (Maipita, 2013).

Kemiskinan merupakan permasalahan global, yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia senantiasa menghadapi dan memperhatikan permasalahan tersebut. Kemiskinan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua aspek, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer adalah aspek yang berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. Sementara itu, aspek sekunder adalah aspek yang berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Kemiskinan juga dapat diartikan suatu kondisi absolut atau relatif di suatu wilayah oleh seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya

sesuai tata nilai atau norma yang berlaku (Arsyad, 2019).

kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara (Fahlefi, 2022).

2.1.2 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan. Menurut Aziz dkk., (2016) faktor yang mempengaruhi kemiskinan antara lain adalah :

- 1) Pendidikan Tingginya pendidikan diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di dunia kerja dan dengan pendidikan dapat mengubah pola pikir menjadi lebih rasional dan logis. Dengan berpikir secara rasional diharapkan dapat menjadi dasar untuk memandang dan menyelesaikan permasalahan. Namun mahalnya biaya pendidikan tidak dapat dijangkau oleh semua masyarakat, meski pemerintah telah memberlakukan kebijakan pendidikan gratis untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), faktor biaya lain seperti buku pelajaran masih sangat tinggi. Seragam sekolah dan keperluan lainnya.

- 2) Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Pada umumnya masyarakat miskin dihadapi dengan masalah terbatasnya kesempatan kerja, terbatasnya peluang mengembangkan usaha, melemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga.
- 3) Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan ekonomi. Pengeluaran pemerintah untuk menyediakan barang publik dan pelayanan kepada masyarakat yang memuat pilihan atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam kebijakan fiskal dikenal beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Pemerintah Indonesia telah membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua yaitu: Pertama, Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan oleh pemerintah untuk kepentingan pemeliharaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja pegawai, belanja barang, berbagai macam subsidi (subsidi dibedakan menjadi dua : subsidi daerah dan subsidi harga barang), pembayaran

angsuran dan bunga utang negara. Kedua, Pengeluaran Pembangunan ialah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat dapat menambah modal masyarakat. Pengeluaran tersebut ditujukan untuk membiayai program pembangunan sehingga anggaran yang diajukan selalu menyesuaikan dana yang didapatkan oleh pemerintah Dana tersebut kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan oleh pemerintah.

2.1.3 Kategori Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik(BPS) mengkategorikan orang miskin antara lain sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kategori Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik

Garis Kemiskinan	Perkapita/Perbulan
Garis Kemiskinan makanan	Rp.397.125,009(
Garis Kemiskinan Bukan Makanan	RP.138.422,00
Hampir tidak miskin	pengeluaran per bulan per kepala antara Rp 280.488,- s/d. Rp 350.610,- atau sekitar antara Rp 9.350,- s/d Rp11.687,- orang/hari. Jumlahnya mencapai 27,12 juta jiwa
Hampir miskin	pengeluaran bulan/kepala antara Rp 233.740,- s/d Rp 280.488,- atau sekitar antara Rp 7.780,- s/d Rp 9.350,- orang/hari. Jumlahnya mencapai 30,02 juta.
Miskin	pengeluaran bulan/kepala Rp

	233.740,- ke bawah atau sekitar Rp 7.780,- ke bawah orang/hari. Jumlahnya mencapai 31 juta.
Sangat Miskin (akronis)	tidak ada kriteria berapa pengeluaran orang/hari. Tidak diketahui dengan pasti berapa jumlah pastinya. Namun, diperkirakan mencapai sekitar 15 juta.

Sumber: BPS(2022)

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (BPS, 2022).

2.1.4 Macam-Macam Kemiskinan

Jacobus dkk. (2018), menjelaskan kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan.

- 1) Kemiskinan alamiah Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan ini terbentuk disebabkan karena adanya kelangkaan sumber daya alam dan kurangnya prasarana umum, serta tanah yang tidak subur
- 2) Kemiskinan Buatan Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang disebabkan oleh modernisasi atau sistem pembangunan, di mana orang tidak memiliki kesempatan yang sama atas sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Adapun Menurut Niswati (2014) teori-teori kemiskinan sebagai berikut:

- a. Teori Konsumsi John Maynard Keynes Dalam teorinya, Keynes mengandalkan analisis statistik dan membuat asumsi tentang konsumsi berdasarkan refleksi dan observasi. Pertama, Keynes mengusulkan bahwa kecenderungan mengkonsumsi marjinal dari jumlah yang dikonsumsi dari setiap pendapatan tambahan adalah antara 0 dan 1. Kedua, Keynes berpendapat bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan, yang disebut kecenderungan mengkonsumsi rata-rata, menurun ketika pendapatan meningkat. Karena Keynes menganggap menabung sebagai kemewahan, dia mengharapkan orang kaya menabung lebih banyak daripada orang miskin. Ketiga, Keynes berpendapat bahwa pendapatan merupakan determinan penting dari konsumsi, tetapi tingkat bunga tidak. Keynes mengatakan bahwa pengaruh suku bunga terhadap konsumsi hanyalah sebuah teori.
- b. Teori Konsumsi dengan Hipotesis Pendapatan Permanen (Milton Friedman) Pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertahan dimasa depan. Pendapatan sementara (pendapatan transitoris) adalah bagian pendapatan yang tidak

diharapkan terus bertahan. Nilai pendapatan ini kadang positif dan kadang negatif.

- c. Teori pendapatan Pendapatan tidak seluruhnya akan dikeluarkan, tetapi ada sebagian yang ditabung (saving). Selanjutnya tentang pengeluaran, ada pengeluaran yang ditujukan untuk barang yang langsung dapat memuaskan kebutuhan (pengeluaran konsumsi), dan ada pengeluaran pengeluaran yang ditujukan untuk membeli barang-barang modal (yaitu pengeluaran investasi), yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh para pengusaha. Oleh karena itu pendapata dapat dirumuskan dengan dua cara yaitu bila Y =pendapatan, C =konsumsi, dan I =investasi, maka:

$$Y = C + S \qquad Y = C + I \quad (1)$$

- d. Teori Lingkaran Kemiskinan Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (civious circle of poverty). keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

2.1.5 Paradigma Pembangunan dan Kemiskinan

Paradigma sebagai ruang lingkup berfikir dan akriktivitas

menjadi variable yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma pembangunan ekonomi. Kemudian variable inilah yang menunjukkan perbedaan antara keduanya, karena perbedaan cara pandang ini memunculkan kesimpulan yang berbeda tentang paradigma pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan dengan pertumbuhan ekonomi (*growth*). Pertumbuhan ekonomi (*growth*) adalah proses kenaikan produksi suatu perekonomian yang mewujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik apabila GDP riil negara tersebut meningkat, dan kemudian hal ini dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi (Fahlefi, 2022).

2.2 Konsep Otonomi Khusus

Sesuai dengan UUD Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah „tertentu“ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. selain itu otonomi = dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- a) kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, dan mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan pendudu.

- b) Komponen utama pengertian otonomi, yaitu komponen wewenang dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintahan yang diperoleh dari pemerintahan pusat melalui desentralisasi wewenang dan wewenang tersebut merupakan wewenang formal dan komponen kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada kata dari dan untuk rakyat yang bisa dilihat dari kemandirian daerah tersebut dari sisi pendapatan yang dihasilkan baik dari pendapatan asli daerahnya (PAD) Yang relatif besar di bandingkan bentuk dana alokasi umum (DAK) serta dana yang lain (Arsyad, 2019).

2.2.1 Manfaat Dana Otonomi Khusus

Nova Iriansyah (2016) dengan adanya limpahan dana otonomi khusus seharusnya Provinsi Aceh harus lebih maju atau menjadi pendorong kuat untuk mengejar ketertinggalan akibat konflik dan bencana. Keberhasilan kinerja di Aceh setidaknya mensyaratkan pada akumulasi dari produktifitas setiap komponen pembangunan untuk menyumbangkan produktifitasnya demi tercapainya percepatan pembangunan dan kemandirian.

2.2.2 Daerah Penerima Dana Otonomi Khusus

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat

istimewa yang diatur dengan undang-undang. Yang dimaksud satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang diberikan otonomi khusus. Daerah-daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain

2.2.3 Aceh ditetapkan sebagai penerima Dana Otonomi Khusus

Daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Provinsi Aceh diberlakukan UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

2.2.4 Sejarah Otonomi Khusus Aceh

Aceh dalam akar sejarahnya dikenal sebagai daerah yang teguh mempertahankan kedaulatannya dari kolonialisme Belanda dan

Inggris. Paska ditandatanganinya Treaty of Sumatera Tahun 1871 yang berisikan penyerahan Aceh dari Inggris kepada Belanda yang berbuah perang panjang yakni tahun 1873-1914, pergolakan demi pergolakan terus dilakukan guna mengusir para penjajah. Puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Indonesia menyatakan merdeka, residen Teungku Nyak arief dan Teungku Daud Beureueh sepakat untuk menggabungkan diri dengan Republik Indonesia (Kadafi, 2000).

Kemudian, terjadi beberapa perselisihan akibat ketidakpuasan atas keputusan politik Republik Indonesia dibawah kabinet Hatta, benih gerakan separatis pun tumbuh. Daud Beureueh menggabungkan diri sebagai bagian dari DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, dikarenakan rasa kecewa elit Aceh atas keputusan “Politik Jakarta” yang hanya menjadikan Aceh daerah setingkat Kabupaten dibawah Provinsi Sumatera Utara, sehingga demikian secara yuridis otomatis Provinsi Aceh dibubarkan begitu saja.

Mudayat (1996) mendefinisikan pilihan memberikan otonomi khusus sebagai affirmative action pun dilakukan guna meredam konflik dan mengakomodir aspirasi masyarakat Aceh, genjatan senjata dilakukan dengan syarat Aceh tidak hanya dijadikan daerah Provinsi tapi lebih dari itu yaitu diakui sebagai Negara Bagian Aceh (NBA). Pendukung NBA ini antara lain adalah Hasan Ali, Hasan Saleh, dan Ishak Amin. Mereka bersepakat dengan wakil pemerintah yaitu Ali Hasjmy, Gaharu, dan Muhammad Insja (kepala polisi). Mereka sepakat dengan tiga tujuan utama yaitu 1)

Memajukan Islam: 2) Membangun Aceh dalam arti luas: 3) Berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat Aceh.

Pada era Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto menerbitkan UU No.5 tahun 1974 yang justru memperteguh sistem pemerintahan sentralistik di Indonesia sehingga mematikan inisiatif, membelenggu kewenangan, membunuh kearifan adat istiadat lokal yang dipaksakan untuk menjadi seragam. Akumulasi dari kekecewaan atas kebijakan tersebut maka pada tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro memproklamkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pasca berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirnya Reformasi. Pemerintah mulai menyadari bahwa bukanlah jalan yang tepat untuk mengatur wilayah otonom di Republik ini dengan seragam. Oleh karena itu lahirlah UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kemudian khusus untuk kasus Aceh beberapa ketetapan MPR mengamanatkan diberlakukannya otonomi khusus. Untuk memenuhi amanat itu, maka pada tahun 2001 ditetapkan UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh. Implementasi otonomi khusus di Aceh pada proses pelaksanaannya UU No.18 tahun 2001 belum mampu meredam konflik dan perlawanan yang dilakukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, berbarengan dengan momentum natural turbulence yaitu tragedi tsunami yang meluluhlantakkan Bumi Seurambi Mekah. Sadar bahwa tindakan represif melalui penetapan DOM (Daerah Operasi Militer) gagal

menyelesaikan akar permasalahan separatisme di Aceh, pemerintah RI mengubah pendekatan penyelesaian konflik dengan GAM, yaitu dengan kembali melakukan perundingan dan dialog. Dari serangkaian perundingan yang dilakukan sejak pengesahan UU No 18 tahun 2001, pada akhirnya pada 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia, akhirnya keluarkan kata mufakat dengan ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM.

Salah satu klausul kesepakatan itu, materi MoU Helsinki akan dituangkan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Untuk memenuhi klausul di atas, maka pada 11 Juli 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh menjadi undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang

UUPA sendiri terdiri dari 40 Bab dan 273 Pasal. Berikut ini beberapa kekhususan pengaturan yang terdapat pada UUPA, antara lain:

- 1) Kewenangan Khusus
- 2) Lembaga di Daerah
- 3) Gubernur Aceh
- 4) pengakuan terhadap Lembaga Adat
- 5) Partai Politik Lokal
- 6) Wali Nanggroe
- 7) pengakuan terhadap Lembaga Adat
- 8) Mahkamah Syar'iyah

- 9) Pengadilan HAM di Aceh
- 10) Pengadilan HAM di Aceh
- 11) Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh
- 12) Pengelolaan Sumber Daya Alam

2.2.5 Implementasi Penggunaan Dana Otonomi Khusus pada Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Telah dijelaskan bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada lima hal yaitu kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, infrastuktur dan sosial. Terdapat dalam Pasal 183 UU. No 11 Tahun 2006 yaitu:

- 1) Dana kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, digunakan untuk penyediaan obat-obatan pada Rumah Sakit, agar setiap rakyat Aceh yang berobat tidak dipungut bayaran, Pembangunan pos-pos kesehatan, memberikan bonus pada para medis dan lain-lain.
- 2) Dana Pendidikan yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Pengajaran digunakan untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak Aceh mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, membangun asrama-asrama mahasiswa yang melanjutkan studi di luar Provinsi Aceh, mensubsidi Yayasan-yayasan pendidikan dan lain-lain.
- 3) Dana Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda),

digunakan untuk membantu pemberian modal kepada rakyat Aceh dalam melakukan aktivitas ekonomi.

- 4) Dana Infrasrtuktur yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah, jalan-jalan yang konsentrasi pemukiman rakyat Aceh, rehabilitasi atau membangun rumah-rumah sederhana untuk rakyat Aceh yang tidak mampu dan lain sebagainya.
- 5) Dana Sosial yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Sosial, digunakan untuk membantu rakyat Aceh dalam pengetasan masalah sosial, korban bencana alam, Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial Akibat Konflik.

2.2.6 Peraturan Gubernur

Berdasarkan peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang pagu indikatif, kriteria dan persyaratan seleksi program / kegiatan pembangunan sumber tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan dana otonomi khusus tahun anggaran 2017. Dalam peraturan gubernur aceh nomor 6 tahun 2016 pasal 5 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa,

- 1) Pengalokasian dana otsus, dilakukan sebagai berikut:
 - a) 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh, selain itu juga

- dialokasikan paling banyak 1% (satu persen) untuk pembangunan ibu kota provinsi;
- b) 40% dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota, yang dilakukan berdasarkan alokasi dasar (foundation grants) dan alokasi formula (formula based grants).
 - c) 60% Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk pendanaan pendidikan tingkat kabupaten/kota
 - d) 10% Alokasi dana otonomi khusus sektor kesehatan.
- 2) Dana Otsus sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) dialokasikan dalam bentuk transfer.

Adapun penyusunan program dan kegiatan yang ditercantum dalam pasal 7 yaitu:

Tabel 2. 2
Program Kegiatan Yang Tercantum Dalam Pasal 7

NO	penyusunan program dan kegiatan
1	Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas Alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Dana Otsus alokasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditunjukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengetasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan serta pelaksanaan keistimewaan Aceh.
2	Penyusunan program dan kegiatan TDBH Migas dan Dana Otsus Alokasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh, Rencana Induk Pemanfaatan

	Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan Kabupaten/Kota berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/kota (RPJPK), Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/kota (RPJMK), RKP Kabupaten/Kota mengacu pada dokumen perencanaan provinsi.
--	--

2.2.7 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia (IPM) diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan pertama kali di publikasi melalui Human Development Report (HDR) tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam berbagai aspek. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. empat elemen utama dalam pembangunan manusia yaitu: (Hakim, 2013).

1. Produktivitas, masyarakat harus sepenuhnya terlibat dalam proses peningkatan produktivitas dan menghasilkan pendapatan dan pekerjaan yang dibayar.
2. Ekuitas, masyarakat harus memiliki akses terhadap kesempatan yang sama
3. Kestinambungan, akses terhadap peluang harus dipastikan tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk generasi mendatang

4. Pemberdayaan, pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus terlibat penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Dalam mengukur parameter kualitas hidup, Indikator daya beli masyarakat digunakan untuk berbagai kebutuhan dasar. Ditinjau dari pengeluaran rata-rata per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mencerminkan pencapaian pembangunan untuk hidup yang layak (BPS, 2022). Dengan kata lain semakin tinggi atau baik setiap komponen yang menyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2.2.8 Pembangunan Manusia di tingkat Kabupaten/ Kota Provinsi Aceh

Pada tahun 2022, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Aceh cukup bervariasi. IPM pada kabupaten/kota berkisar antara 66,20 (Kota Subulussalam) hingga 86,28 (Kota Banda Aceh). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, UHH berkisar antara 64,30 tahun (Kota Subulussalam) hingga 71,87 tahun (Kota Lhokseumawe). Sementara pada dimensi pengetahuan, HLS berkisar antara 13,06 tahun (Kabupaten Aceh Timur) hingga 17,81 tahun (Kota Banda Aceh), dan RLS berkisar antara 8,22 tahun (Kota Subulussalam) hingga 13,03 tahun (Kota Banda Aceh). Sedangkan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan di tingkat kabupaten/kota berkisar antara Rp7.371 juta

per tahun (Kabupaten Simeulue) hingga Rp17.228 juta per tahun (Kota Banda Aceh). Status capaian pembangunan manusia menurut kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2022 terdapat perubahan 5 kabupaten yang berstatus ‘tinggi’ dari tahun sebelumnya berstatus “sedang.” Jumlah kabupaten/kota yang berstatus “sedang” pada tahun 2022 sebanyak 7 kabupaten/kota, dan terdapat 15 kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Sabang, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Sedangkan satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Aceh berstatus “sangat tinggi” adalah Kota Banda Aceh (BPS, 2022).

2.3 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah untuk mengatur keuangan daerah sesuai potensi masing-masing. Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi poin no return, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta quality improvement. Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif

dan berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18, 18 A dan 18 B, Undang-Undang nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang pemeriksaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah. Namun sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara *lex specialis* mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

2.4 Penelitian Terdahulu

2.4.1 Matrik Penelitian Terdahulu

Dalam jurnal Shinta Warouw, Grace Nangoy, dan Treesje Runtu (2016) bahwa penggunaan anggaran dana otonomi khusus dititik beratkan kepada empat hal yaitu kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur. Anggaran Otonomi Khusus yang di salurkan Pemerintah Pusat ke Kota Sorong senantiasa mengalami peningkatan, selalu terealisasi penuh dan tidak terjadi penyimpangan.

Dalam jurnal Erwan Agus Purwanto (2007) usaha kecil

menengah bisa dijadikan sebagai strategi untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia, namun karena kurangnya perhatian pemerintah Orde Baru ke sektor ini dan preferensi rezim Orde Baru lebih besar perhatiannya ke perusahaan, sehingga sektor ini telah menjadi keterbelakangan. Seharusnya pemerintah mengambil kebijakan yang baik dari sektor usaha kecil menengah dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia

Dalam jurnal Nunung Nurwati (2008) kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia serta berbagai ragam faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat. Berbagai kebijakan dan program yang ada dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Tentunya rumusan kebijakan dan program perlu dibenahi dan dilakukan rumusan kebijakan sesuai dengan pentahapan, dalam merumuskan kebijakan tersebut harus diperhatikan dan dipahami karakteristik kemiskinan di masing-masing daerah.

Dalam jurnal Nano Prawoto (2009) Mencermati beberapa kekeliruan para digmatik penanggulangan kemiskinan, dimana analisis yang seharusnya memunculkan variabel, variabel yang signifikan untuk menanggulangi kemiskinan justru variabel yang

tidak signifikan dimasukkan, maka strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan: seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain; untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan; melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan.

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penelitian	Jenis	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1.	Teuku Alfiady, Risna Dewi (2020) OTONOMI KHUSUS DAN KEMISKINAN DI ACEH: Gambaran Kemiskinan Pelaku Usaha Batu Bata di Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	Pemberian otonomi khusus dapat menanggulangi persoalan disintegrasi, namun otonomi khusus belum dapat menjawab persoalan yang substansial yaitu penanganan kemiskinan secara absolut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana informasi digali secara mendalam mungkin dari sumber yang kredibel dan relevan yang dapat menjawab persoalan yang diajukan.	Persamaannya ialah menggunakan variabel Otsus sebagai X, Perbedaannya Objek penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat. sedangkan penelitian ini hanya pada provinsi Aceh.
2.	Analisis Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi	Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan	Pertama, DAU berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal sedangkan dana Otsus	Persamaannya yaitu model Analisis yang menggunakan Uji Asumsi

No	Identitas Penelitian	Jenis	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
	Khusus, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Dan Kabupaten Provinsi Papua, Marshall Halono Andre Laimeheriwa (2013).	Uji Regresi.	tidak berpengaruh secara signifikan. Kedua, DAU berpengaruh secara signifikan terhadap IPM sedangkan dana Otsus tidak berpengaruh secara signifikan. Ketiga, Otsus dan DAU melalui belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM.	klasik dan Uji Regresi. Perbedaannya yaitu penggunaan variabel bebas dipenelitian ini variabel Y terhadap belanja modal dan indeks pembangunan manusia.
3.	Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan, Nunung Nurwati (2008)	Metode kualitatif	Kemiskinan merupakan Masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, social budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kemiskinan yang ada di Indonesia serta berbagai ragam Faktor penyebabnya, tentunya sangat mempengaruhi rumusan kebijakan yang dibuat. Berbagai kebijakan dan program yang ada	Persamaanya ialah penggunaan variabel x sebagai variabel bebas yaitu Kemiskinan, Sedangkan perbedaannya ialah metode penelitian yang berbeda pada penelitian Nurwati menggunakan metode penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini kuantitatif.

No	Identitas Penelitian	Jenis	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
			<p>dirasakan masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, hal ini terbukti dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Tentunya rumusan kebijakan dan program perlu dibenahi dan dilakukan rumusan kebijakan sesuai dengan pentahapan, dalam merumuskan kebijakan tersebut harus diperhatikan dan dipahami karakteristik kemiskinan di masing-masing daerah.</p>	
4.	Memahami Kemiskinan dan Strategi Penanggulangannya, Nano Prawoto (2009)	Kuantitatif	Mencermati beberapa Kekeliruan para digmatik Penanggulangan kemiskinan, dimana analisis yang seharusnya memunculkan variabel variabel yang signifikan untuk menganggulangi kemiskinan	Persamaannya ialah penggunaan variabel Y yaitu Kemiskinan, Sedangkan perbedaannya ialah Metode penelitian.

No	Identitas Penelitian	Jenis	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
			<p>justru variabel yang tidak signifikan</p> <p>Mencermatibeberapa kekeliruan para digmatik penanggulangan kemiskinan, dimana analisis yang seharusnya memunculkan variabel variabel yang signifikan untuk mengganggu kemiskinan</p> <p>justru variabel yang tidak signifikan dimasukkan, maka strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan, melibatkan masyarakat miskin</p>	

No	Identitas Penelitian	Jenis	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
			dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, strategi pemberdayaan.	
5.	Annisa, Wahyu, Hikmah (2019) Pengaruh DAK, DAU, PAD, Silpa, Luas Wilayah Dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah).	Kuantitatif	IPM mempunyai hubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin dimana jika IPM naik maka jumlah penduduk miskin akan naik.	Persamaannya adalah metode analisi dan metode penelitian sedangkan perbedaannya ialah jumlah penggunaan variabel terikat, dipenelitian Alhudhori menggunakan satu variabel terikat sedangkan dipenelitian ini menggunakan dua variabel terikat.

Sumber: Data Diolah 2023

2.5 Hubungan Antar Variabel

2.5.1 Pengaruh Dana Otsus Terhadap Belanja Kemiskinan

Otonomi Khusus (otsus) merupakan bagian dari resolusi konflik Aceh yang berkepanjangan membuat Aceh menjadi pusat perhatian dunia serta upaya perdamaian yang dibarengi dengan semangat rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca bencana

tsunami tahun 2004 silam. Berawal dari penandatanganan kesepakatan damai MoU Helsinki antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 dan legalnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, seluruh komponen negara berbondong-bondong memusatkan perhatian dan potensi bangsa untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Aceh seperti sedia kala, bahkan harus jauh lebih baik. Salah satu upaya konkret dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Aceh dengan mengalokasikan dana otonomi khusus.

Variabel Otsus berpengaruh kepada kemiskinan karena kian besar dana otsus didapatkan oleh daerah sehingga kemiskinan bisa dikurangi. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih and Haryanto (2019) menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara Otsus dengan kemiskinan, (Nopitasari, 2017) juga mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara otsus dengan kemiskinan (Aditya & Dirgantari, 2017) mengatakan bahwasanya otsus memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Maka dari itu, hipotesis pada penelitian ini seperti berikut:

H_1 = Dana otonomi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

2.5.2 Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Indeks pembangunan manusia (IPM) diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan pertama kali di dipublikasi melalui Human Development

Report (HDR) tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam berbagai aspek. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. empat elemen utama dalam pembangunan manusia.

Berdasarkan penelitian dari Alhudhori (2017) IPM memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. (Kumar, 2016) juga mengindikasikan bahwa IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut menyatakan bahwa terdapat indikasi kuat bahwa kemiskinan sangat dipengaruhi oleh IPM. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ = Indeks pembangunan manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

2.5.3 Pengaruh Otsus dan IPM Terhadap Kemiskinan

Otonomi Khusus (otsus) merupakan bagian dari resolusi konflik Aceh yang berkepanjangan membuat Aceh menjadi pusat perhatian dunia serta upaya perdamaian yang dibarengi dengan semangat rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca bencana tsunami tahun 2004 silam. Berawal dari penandatanganan kesepakatan damai MoU Helsinki antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2005 dan legalnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, seluruh komponen negara berbondong-

bondong memusatkan perhatian dan potensi bangsa untuk meningkatkan percepatan pembangunan di Aceh seperti sedia kala, bahkan harus jauh lebih baik. Salah satu upaya konkret dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Aceh dengan mengalokasikan dana otonomi khusus.

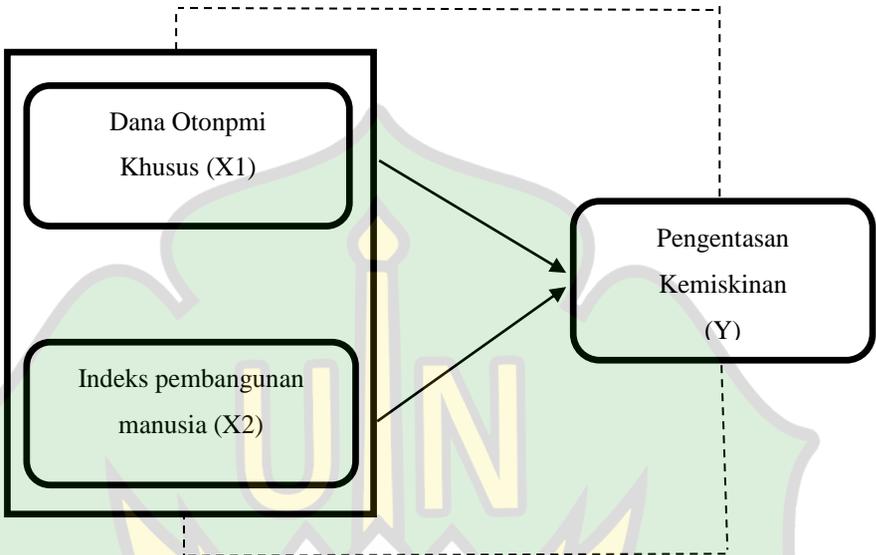
Indeks pembangunan manusia (IPM) diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan pertama kali di dipublikasi melalui Human Development Report (HDR) tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam berbagai aspek. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai, dan standar hidup yang layak. empat elemen utama dalam pembangunan manusia. Berdasarkan uraian diatas Otsus dan IPM dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_3 =$ Dana otsus, IPM secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

2.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini dilakukan pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan tingkat kemiskinan yang dilihat dari beberapa variabel yaitu dana otonomi khusus masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian sebagai berikut.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.7 Hipotesis

Dugaan Awal untuk pengujian apakah benar atau tidak dengan cara melihat dari hasil analisis penelitian merupakan pengertian dari hipotesis. Berikut hipotesis yang dikeluarkan pada penelitian yaitu:

H_1 = Dana otonomi khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

H_2 = Indeks pembangunan Manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Aceh

H_3 = Dana otsus, IPM secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bappeda. Data sekunder ialah data primer yang sudah diolah lebih lanjut serta disajikan oleh pihak pengumpul data, data sekunder bisa diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Data internal merupakan data yang diperoleh dari lembaga maupun industri tempat riset dilakukan sebaliknya data eksternal ialah data yang didapat dari Badan pusat Statistik. Adapun objek dalam penelitian ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dari tahun 2020 hingga 2022.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik (Angka), dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti (Arikunto, 2016).

3.2 Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder,

bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Bappeda. Data sekunder ialah data primer yang sudah diolah lebih lanjut serta disajikan oleh pihak pengumpul data, data sekunder bisa diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Data internal merupakan data yang diperoleh dari lembaga maupun industri tempat riset dilakukan sebaliknya data eksternal ialah data yang didapat dari Badan pusat Statistik. Adapun objek dalam penelitian ini mencakup 23 kabupaten/kota di Aceh dari tahun 2020 hingga 2022. Maka Data yang digunakan data Panel.

3.3 Variabel Penelitian

3.3.1 Klasifikasi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel yang terbagi terbagi dua yaitu variable dependen dan variable independen. Adapun variabel independen yaitu, Otonomi khusus, sedangkan variable dependennya adalah pengentasan kemiskinan.

3.3.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau bebas. Pada Penelitian ini Kemiskinan sebagai variabel dependen (Y) Kemiskinan adalah sebuah fenomena, suatu kenyataan yang belum dan tidak akan pernah terhapuskan dari muka ini. Kemiskinan timbul akibat perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan, dan perbedaan sumber daya.

3.3.3 Variabel Independen

Variabel independen atau disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen secara positif maupun negatif. Berikut adalah variabel Independen pada penelitian ini: (Kadafi, 2019)

1. Dana otonomi khusus (DOK) sebagai variable independen (X1) merupakan dana yang berpenghasilan dari APBN yang diberikan kepada provinsi Aceh.
2. Indek pemabungan mannusia (IPM) sebagai variabel independen (X2) merupakan salah satu variabel bauran pada belanja Pendidikan dan Kesehatan yang merupakan transfer pada dana otonomi khusus yang bersumber dari APBN, yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan dalam pelaksanaan desentralisasi .

Tabel 3. 1
Operasional Variabel

No	Variabel	Deskripsi	Indikator	Satuan
A	Variabel dependen			
	Kemiskinan	Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dalam	Angka kemiskinan, Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan.	Persentase

No	Variabel	Deskripsi	Indikator	Satuan
		periode tahun tertentu dinyatakan dengan satuan persen.		
B	Variabel Independen			
1	Dana Otsus	Dana Otonomi Khusus adalah sumber penerimaan negara untuk membiayai pembangunan, khususnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pembiayaan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang diukur dengan satuan rupiah.	Jumlah penggunaan dana Otsus	Rupiah
2	Indeks pembangunan Manusia(IPM)	Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator bagaimana penduduk memiliki akses terhadap hasil	Angka melek huruf, harapan hidup dan pengeluaran perkapita.	Indeks

No	Variabel	Deskripsi	Indikator	Satuan
		pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lainnya. diukur dengan satuan rupiah.		

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis panel sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 10. Analisis panel merupakan kombinasi antara deret waktu (*time series*) dan deret lintang (*cross section*) (Arifianto, 2016).

Teknik analisis model panel dikenal tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan *common effect*, *fixed effect* dan pendekatan *random effect* (Arifianto, 2012). Ketiga penjelasan yang dilakukan dalam analisis panel dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Common Effect Model (CEM), merupakan model pendekatan data panel paling sederhana dengan mengkombinasi data cross section dan time series tanpa memperhatikan dimensi individu maupun waktu, mengestimasiya dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (pool test square) atau menggunakan pendekatan OLS, Common Effect Model dapat diformulasikan sebagai

effect digunakan ketika unobserved effect tidak berkorelasi dengan satu atau lebih variabel bebas. Berubahnya waktu dan berbedanya observasi dapat dilakukan dengan pendekatan 45 model komponen eror (error component model) atau disebut juga effect acak (random effect). Penggunaan model ini dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Persamaan model ini diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{LOGY}_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \text{LOGX}_{1it} + \beta_2 \text{LOGX}_{2it} + \dots + \epsilon_{it}$$

Dimana :

Y_{it} : Variabel dependen individu i periode ke t

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X_{it} : Variabel Bebas individu i periode ke t

i : Kabupaten/Kota

t : Waktu ϵ_{it} : error term

3.5 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik diuji bertujuan agar dapat melihat baik atau tidak jenis regresi tersebut sebagai penilaian. Pengujian asumsi klasik dapat dilakukan melalui beberapa pengujian yaitu: uji autokorelasi, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3.5.1 Uji Normalitas

Menurut Sarjono dan Julianita (2016) Uji normalitas

bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali dalam Suhandana (2020) Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji adanya korelasi yang tinggi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Model regresi yang baik harus terhindar dari autokorelasi. Jika terjadi korelasi, maka diidentifikasi terjadi masalah autokorelasi dan tidak bagus serta tidak cocok untuk diasumsikan melalui persamaan

3.5.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Sarjono dan Julianita (2016) Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi yang dipakai dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu regresi maka ditinjau dari grafik scatter plot (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID). Modal bebas dari gejala heterokedastisitas jika grafik scatter plot berpola menyebar, begitupula sebaliknya suatu model memiliki gejala heterokedastisitas jika grafiknya terfokus atau tidak menyebar.

3.5.4 Uji Multikolenaritas

Dalam asumsi regresi linear klasik, antar variabel independen tidak diijinkan untuk saling kolerasi. Salah satu Uji yang dilakukan untuk memastikan apakah didalam sebuah model regresi terdapat kolinearitas antara variabel bebas disebut uji multikolinearitas. Jika terdapat gejala yang bersangkutan dapat berimbas pada tingkat varian koefisien yang cukup besar dan memiliki dampak pada tingkat kepercayaan terhadap variabel bebas.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Regresi Linear berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Yang dimaksud dengan analisis regresi linear berganda

adalah analisis mengukur variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji regresi berganda yang digunakan maka persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \quad (3.1)$$

- a = Konstanta
- Y = Kemiskinan
- X₁ = Dana otsus
- X₂ = Indeks Pembangunan Manusia
- b₁ b₂ b₃ = Koefisien Regresi
- e = Standar Error

3.6.2 Uji Determinasi (R^2)

R Square (R^2) atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke persen, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi semakin kecil (mendekati nol) artinya semakin kecil pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai R^2 semakin mendekati 100% maka semakin besar berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Agus dan Dyah, 2007:195).

3.7 Pengujian Hipotesis

Setelah melewati beberapa pengujian tersebut (Uji instrument dan uji asumsi klasik), maka sampailah pada Uji hipotesis untuk mengetahui berpengaruh tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen.

3.7.1 Uji Parsial

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan dari variabel-variabel dalam mempengaruhi variabel dependen dengan taraf signifikansinya 5% atau 0,05. penerimaan maupun penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- a) Jika nilai signifikan $> 5\%$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Jadi secara parsial variabel dependen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai signifikan $< 5\%$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Berarti secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

dengan hipotesis, yaitu:

H_{01} = Dana Otonomi Khusus (Otsus) tidak memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

H_{a1} = Dana Otonomi Khusus (Otsus) memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

H_{02} = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

H_{a2} = Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

3.7.2 Uji Simultan

Signifikan model Regresi secara simultan diuji dengan melihat

nilai signifikan (sig) dimana jika nilai sig dibawah 5% maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji F statistic digunakan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh antara independen terhadap dependen secara simultan.

Kriteria dari uji F sebagai berikut:

- a) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- b) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
atau
- c) Jika $f_{hitung} p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- d) Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

dengan hipotesis yaitu:

H_{03} = Otsus dan IPM tidak memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

H_{a3} = Otsus dan IPM memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Provinsi Aceh adalah sebuah wilayah di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki sejarah dan budaya yang kaya, di mana mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Aceh dikenal dengan sebutan "Negeri Serambi Mekah" karena peran pentingnya dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Pada tahun 2005, Aceh mulai mengalami perkembangan dan kemajuan dalam berbagai sektor, termasuk pariwisata, industri, dan pendidikan. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Luas wilayahnya sekitar 57.365-kilometer persegi, menjadikannya provinsi terbesar di Indonesia berdasarkan luas. Provinsi Aceh juga memiliki jumlah penduduk yang cukup signifikan, dengan perkiraan jumlah penduduk sekitar 5 juta jiwa. Wilayah ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, dengan pemandangan alam yang indah, termasuk pegunungan, hutan hujan tropis, dan pantai yang menarik. Selain itu, Aceh juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang kaya, di mana terdapat berbagai warisan budaya dan bangunan bersejarah yang mencerminkan perpaduan kebudayaan Aceh dan Islam.

Gambar 4.1
Peta Provinsi Aceh



Sumber: BPS, (2023)

4.2 Analisis Deskriptif Statistik

Analisis ini Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi awal mengenai variabel-variabel yang relevan untuk memahami fenomena yang sedang di investigasi. Melalui analisis data yang teliti, diperoleh nilai statistik deskriptif yang memberikan ringkasan tentang sifat-sifat kunci dari variabel tersebut. Dengan memanfaatkan nilai statistik deskriptif dari ketiga variabel penelitian ini, peneliti dapat memperoleh gambaran awal yang mendalam mengenai karakteristik dan distribusi data, sehingga dapat memberikan bantuan dalam mendapatkan pemahaman awal yang lebih baik terhadap fenomena yang sedang diteliti. Hasil

analisis ini menunjukkan pentingnya informasi yang terperinci tentang variabel-variabel tersebut untuk mengungkapkan esensi dari fenomena yang sedang di observasi. Berikut adalah hasil dari analisis ini:

Tabel 4. 1
Statistik Deskriptif

	LOGOtsus	LOGIPM	Kemiskinan
<i>Minimum</i>	24.87562	24.87562	6.900000
<i>Maximum</i>	25.60229	25.60229	20.36000
<i>Mean</i>	25.26908	25.26908	15.34014
<i>Std. Dev.</i>	0.174724	0.174724	3.338484
<i>Observations</i>	69	69	69

Sumber: Data Diolah, (2023)

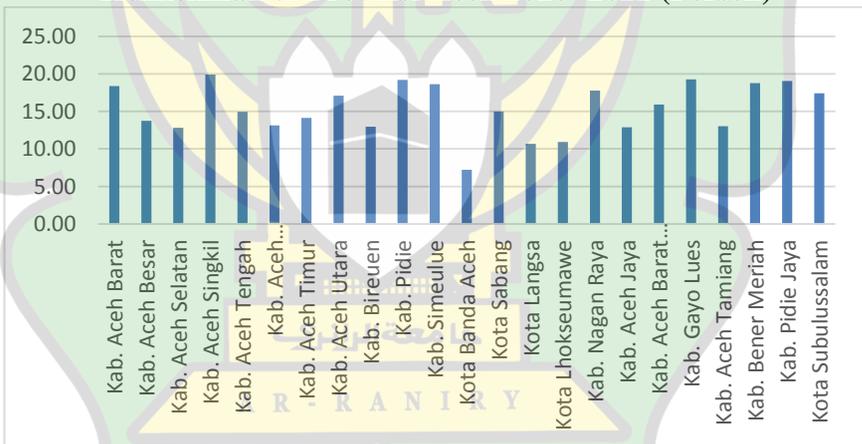
4.2.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu, keluarga, atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kondisi ini mencakup ketidakmampuan untuk memperoleh pangan, air bersih, pakaian layak, tempat tinggal yang layak, serta akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kemiskinan juga seringkali menyebabkan ketidaksetiaan dan keterbatasan kesempatan, menghambat perkembangan individu, dan mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.

Berdasarkan Tabel 4.1 yang terdiri dari 69 sampel

observasi, beberapa statistik deskriptif mengenai variabel kemiskinan ditemukan. Variabel kemiskinan menunjukkan nilai terkecil (*minimum*) sebesar 6.9000 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 20.360. Selain itu, nilai rata-rata kemiskinan mencapai 15.340, yang menggambarkan nilai tengah dari data kemiskinan dalam sampel tersebut. Dalam hal variasi data, standar deviasi kemiskinan tercatat sebesar 3.338, yang menunjukkan tingkat variasi data dari nilai rata-rata kemiskinan. Hasil ini memberikan gambaran komprehensif tentang karakteristik variabel kemiskinan dalam konteks penelitian ini.

Gambar 4. 2
Kemiskinan di Provinsi Aceh 2020 -2022 (Persen)



Sumber: Data Diolah, (2023)

Berdasarkan Grafik 4.1 Data panel kemiskinan Provinsi Aceh tersebut mencakup angka persentase kemiskinan dari tahun 2020 hingga 2022. Tingkat kemiskinan bervariasi dari sekitar 7.21% di Kota Banda Aceh yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah hingga 19.91% di Kabupaten Aceh Singkil yang

memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi fluktuasi ini meliputi tingkat pengangguran, akses pendidikan, struktur ekonomi lokal, serta isu-isu sosial dan demografis. Kota-kota besar seperti Banda Aceh cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah karena biasanya lebih banyak peluang pekerjaan dan akses ke layanan publik.

4.2.2 Dana Otonomi Khusus

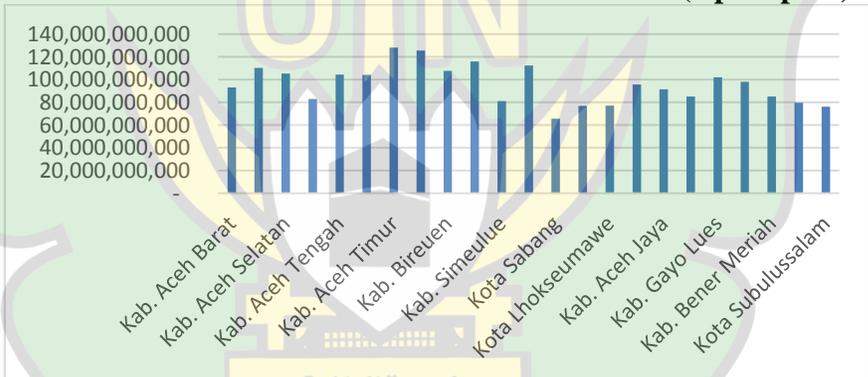
Dana Otonomi Khusus Aceh adalah bentuk alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh sebagai bagian dari implementasi kebijakan otonomi khusus sesuai dengan perjanjian damai Helsinki pada tahun 2005. Dana ini diberikan untuk mendukung upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca konflik serta mempercepat pembangunan di Aceh. Dana Otonomi Khusus ini memiliki karakteristik khusus, di mana pemerintah Aceh memiliki otonomi dalam penggunaan dan pengelolaannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Dana tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan infrastruktur, sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta mendukung upaya pemulihan sosial dan rehabilitasi masyarakat. Penggunaan dana ini harus transparan dan akuntabel, serta didukung oleh perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan, guna memastikan bahwa dana tersebut berdampak positif bagi kesejahteraan dan kemajuan Provinsi Aceh.

Berdasarkan Tabel 4.1 yang terdiri dari 69 sampel observasi,

beberapa statistik deskriptif mengenai variabel Otsus ditemukan. Variabel Otsus menunjukkan nilai terkecil (*minimum*) sebesar 24.875 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 25.602. Selain itu, nilai rata-rata Otsus mencapai 25.269, yang menggambarkan nilai tengah dari data Otsus dalam sampel tersebut. Dalam hal variasi data, standar deviasi Otsus tercatat sebesar 0.174, yang menunjukkan tingkat variasi data dari nilai rata-rata Otsus. Hasil ini memberikan gambaran komprehensif tentang karakteristik variabel Otsus dalam konteks penelitian ini.

Gambar 4. 3

Data Otonomi Khusus Provinsi Aceh 2020-2022 (Rp Rupiah)



Sumber: Data Diolah, (2023)

Data tersebut menggambarkan jumlah alokasi otonomi khusus Aceh per kota/kabupaten. Terdapat variasi yang signifikan dalam alokasi tersebut, dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Utara memiliki alokasi tertinggi, masing-masing sekitar 127,9 miliar Rupiah dan 125,4 miliar Rupiah. Sementara itu, Kota Sabang dan Kabupaten Pidie Jaya memiliki alokasi terendah, masing-masing sekitar 65,4 miliar Rupiah dan 79,4 miliar

Rupiah. Variasi ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai faktor, termasuk populasi, kebutuhan pembangunan, dan kondisi sosio-ekonomi di setiap daerah. Alokasi otonomi khusus ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah Aceh, mengatasi ketimpangan regional, dan memberikan sumber daya tambahan bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

4.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan perkembangan manusia dalam suatu negara atau wilayah. IPM menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup yang mencerminkan kualitas kesehatan, angka melek huruf dan tingkat pendidikan untuk memperlihatkan taraf pendidikan, serta Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai tolak ukur standar hidup. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi ini, IPM memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kesejahteraan masyarakat dan memberikan informasi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan yang berfokus pada meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan bagi seluruh penduduk.

Berdasarkan Tabel 4.1 yang terdiri dari 69 sampel observasi, beberapa statistik deskriptif mengenai variabel IPM ditemukan. Variabel IPM menunjukkan nilai terkecil (*minimum*) sebesar 24.875 dan nilai terbesar (*maximum*) sebesar 25.602. Selain

itu, nilai rata-rata IPM mencapai 25.269, yang menggambarkan nilai tengah dari data IPM dalam sampel tersebut. Dalam hal variasi data, standar deviasi IPM tercatat sebesar 0.174, yang menunjukkan tingkat variasi data dari nilai rata-rata IPM. Hasil ini memberikan gambaran komprehensif tentang karakteristik variabel IPM dalam konteks penelitian ini.

Gambar 4. 4
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh 2020-2022
(Persen)



Sumber: Data Diolah, (2023)

Berdasarkan data Grafik 4.3 menunjukkan perubahan Data tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per kota/kabupaten di Aceh menggambarkan variasi signifikan dalam kesejahteraan penduduk di daerah tersebut. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per kota/kabupaten di Aceh menunjukkan variasi yang signifikan. Banda Aceh memiliki IPM tertinggi sebesar 85.80, sedangkan Subulussalam memiliki IPM terendah sebesar 65.47. Kenaikan dan penurunan IPM di kota/kabupaten ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai faktor ekonomi, sosial,

dan infrastruktur. Kenaikan IPM mungkin disebabkan oleh peningkatan investasi dalam pendidikan, perbaikan kesehatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Sementara itu, penurunan IPM bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti konflik, bencana alam, atau ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya.

4.3 Analisis Data Inferensial

Dalam penelitian ini, terdapat tiga metode uji yang dapat digunakan untuk menguji model estimasi, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier-Test. Metode uji Chow digunakan untuk menguji konsistensi model regresi, yaitu apakah model yang diestimasi pada dua kelompok data yang berbeda adalah sama. Uji Hausman, di sisi lain, membandingkan model dengan parameter tetap dengan model yang parameter-parameternya diestimasi. Sementara itu, uji Lagrange Multiplier-Test digunakan untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dalam model regresi. Ketiga pengujian itu dinilai dapat membantu dalam pemilihan model terbaik yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai:

Tabel 4. 2
Penentuan Pemilihan Model Data Panel

Alat Pengujian	Hipotesis	Ketentuan	Keterangan
Uji Chow	H_0 = menggunakan <i>Common Effect Model</i> .	Jika $p\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i> .
	H_1 = menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> .	Jika $p\text{-value} < \alpha$ maka H_1 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	H_0 = menggunakan <i>Random Effect Model</i>	Jika $p\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>
	H_1 = menggunakan <i>Fixed Effect Model</i> .	Jika $p\text{-value} < \alpha$ maka H_1 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Fixed Effect Model</i>
Uji Lagrange Multiplier	H_0 = menggunakan <i>Common Effect Model</i> .	Jika $p\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Common Effect Model</i>
	H_1 = menggunakan <i>Random Effect Model</i>	Jika $p\text{-value} < \alpha$ maka H_1 diterima	Model yang digunakan adalah <i>Random Effect Model</i>

Sumber: Data Diolah, 2023

Tabel 4. 3
Hasil Pemilihan Model Panel

Model Estimasi	Alat Penguji	P-value	Model yang digunakan
<i>Common Effect Model</i> atau <i>Fixed Effect Model</i>	Uji Chow	0.0000 < 0.05	<i>Fixed Effect Model</i>
<i>Random Effect Model</i> atau <i>Fixed Effect Model</i>	Uji Hausman	0.2433 > 0.05	<i>Random Effect Model</i>
<i>Common Effect Model</i> atau <i>Random Effect Model</i>	Uji Lagrange Multiplier	0.0000 < 0.05	<i>Random Effect Model</i>

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji yang tercantum pada Tabel 4.3,

ditemukan bahwa nilai *p-value* memiliki nilai sebesar 0,0007, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menyiratkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Selanjutnya, dilakukan pengujian dengan uji Hausman, dan diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,2780, yang melebihi tingkat signifikansi 0,05. Akibatnya, hipotesis nol (H_0) diterima, dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak. Melalui hasil pengujian ini, dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect Model* dipilih beberapa kali, menandakan bahwa model tersebut lebih sesuai dan menjadi pilihan yang terbaik dalam penelitian ini. Oleh karena itu, hasil dari pengujian lainnya diabaikan, dan *Random Effect Model* dipandang sebagai model yang paling relevan untuk analisis data dalam penelitian ini.

4.4 Analisis Data Panel

Pengujian hipotesis adalah suatu proses evaluasi yang digunakan untuk menilai keandalan bukti yang diambil dari sampel data guna memberikan landasan bagi pengambilan keputusan terkait suatu populasi. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah hipotesis yang sedang diuji dapat ditolak atau diterima berdasarkan hasil analisis data sampel. Dalam konteks pemilihan model, telah diidentifikasi bahwa model terbaik yang sesuai adalah *Random Effect Model* (REM). Sebagai hasil dari proses estimasi REM, dilakukan uji t secara parsial, uji f secara simultan, dan juga menghitung nilai koefisien determinasi (R^2) sebagai indikator

tingkat variabilitas yang dapat dijelaskan oleh model. Hasil estimasi dari pengujian tersebut akan memberikan wawasan penting dalam menginterpretasi hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam model dan berpotensi memberikan implikasi yang relevan bagi konteks penelitian atau analisis yang sedang dilakukan.

Tabel 4. 4
Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Jumlah Observasi: 69		
Variabel	Koefisien	Prob
C	381.9339	0.0000
LOGOtsus	-7.118302	0.0000
LOGIPM	-43.73607	0.0000
R-Squared		0.556685
Prob F (statistik)		0.000000

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil dari tabel diatas menunjukkan bahwa pengolahan data menggunakan model *Random Effect Model* maka dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

$$Y = 381.9339 - 7.118302 (OTS) - 43.73607 (IPM)$$

1. Nilai tetap 381.9339 menunjukkan bahwa kemiskinan akan memiliki nilai sebesar itu bahkan ketika variabel otsus dan indeks pembangunan manusia tidak ada dalam pertimbangan, maka nilai konstan yang dihasilkan yaitu sebesar 381.9339.
2. Variabel Otonomi Khusus menunjukkan nilai koefisien - 7.118302 dengan arah yang negatif, yang berarti setiap peningkatan satu persen dalam Otsus akan mengakibatkan

penurunan kemiskinan sebesar -7.118302% , dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

3. Variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan nilai koefisien -43.73607 dengan arah yang negatif, yang berarti setiap peningkatan satu persen dalam IPM akan mengakibatkan penurunan kemiskinan sebesar -43.73607% , dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

4.5 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis uji T, uji F, dan R^2 adalah teknik analisis statistik yang digunakan dalam penelitian untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tertentu dan menjelaskan tingkat variasi dari suatu fenomena. Uji T digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara dua kelompok atau variabel, dan berfokus pada perbedaan rata-rata dari sampel. Uji F digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, serta dapat menilai kecocokan model regresi. Sedangkan R^2 adalah koefisien determinasi yang mengukur persentase variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi. Semakin tinggi nilai R^2 , semakin baik model regresi dalam menjelaskan variasi data.

Tabel 4. 5
Pengujian Hipotesis *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	381.9339	48.66014	7.849010	0.0000
LOGOTSUS	-7.118302	1.502932	-4.736278	0.0000
LOGIPM	-43.73607	4.906648	-8.913636	0.0000

Sumber: Data Diolah, 2023

Hasil dari tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pengolahan data menggunakan model *Random Effect Model* maka pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Uji T (Secara Parsial)
 - a. Variabel Dana Otonomi Khusus mempunyai *P-value* dengan nilai $0.0429 < 0.05$ dengan makna H1 diterima dan H0 ditolak yang artinya bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
 - b. Variabel Indeks Pembangunan Manusia mempunyai *P-value* dengan nilai $0.0000 < 0.05$ dengan makna H1 diterima dan H0 ditolak yang artinya bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Uji F (Secara Simultan)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai f-statistik adalah 0.000000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05. Artinya, variabel Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan

terhadap variabel terikat, yaitu kemiskinan di Provinsi Aceh. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan di wilayah tersebut berdasarkan tabel hasil pengujian yang menunjukkan nilai *f-statistik* yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang telah ditentukan.

3. Koefisien Determinasi (R_2)

Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang mengindikasikan seberapa baik model mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen. Rentang nilai koefisien determinasi berada antara 0 hingga 1. Ketika nilai R^2 rendah, itu menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Dalam hasil regresi yang tercantum pada Tabel 4.4, didapatkan nilai koefisien determinasi (R^2) untuk pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh adalah sebesar 0,556 atau setara dengan 55,6%. Hal ini menunjukkan bahwa 55,6% dari variasi kemiskinan di Provinsi Aceh dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen tersebut. Sementara itu, sebesar 44,4% dari variasi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model.

4.6 Hasil dan Pembahasan

4.6.1 Dana Otonomi Khusus Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis regresi sebelumnya menunjukkan bahwa variabel dana otonomi khusus menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kemiskinan di Provinsi Aceh. Variabel dana otonomi khusus memiliki nilai koefisien sebesar -7.118302 , yang menandakan bahwa adanya perubahan dalam dana otonomi khusus berkaitan dengan perubahan dalam tingkat kemiskinan, dan arahnya adalah negatif, sehingga peningkatan dana otonomi khusus berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan. Lebih lanjut, nilai probabilitas untuk variabel ini adalah 0.0000 , yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi α yang ditetapkan sebesar 0.05 . Dengan demikian, berdasarkan hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sakinah (2021) menyatakan dalam penelitiannya bahwa dana otonomi khusus dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan penelitian Perdana (2022) Dalam Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana otonomi khusus Aceh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berkaitan dengan penelitian (Juliarni, 2020) menyatakan bahwa otonomi khusus khusus memiliki hubungan yang negatif dengan indeks pembangunan manusia. Hubungan negatif otonomi khusus dengan kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut.

Otonomi khusus mengacu pada pemberian hak istimewa tertentu kepada suatu wilayah atau daerah dalam sebuah negara. Ketika otonomi khusus diberikan kepada suatu wilayah yang mengalami kemiskinan, dapat terjadi efek negatif terhadap upaya penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, otonomi khusus dapat menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang menerima otonomi dan wilayah lainnya, sehingga dana dan sumber daya yang dialokasikan lebih besar pada wilayah tersebut, sedangkan wilayah miskin tetap tertinggal. Kedua, dalam beberapa kasus, pengelolaan dan alokasi dana otonomi khusus tidak selalu efisien dan transparan, sehingga dana tersebut tidak tepat sasaran dan tidak memberikan manfaat maksimal bagi penanggulangan kemiskinan.

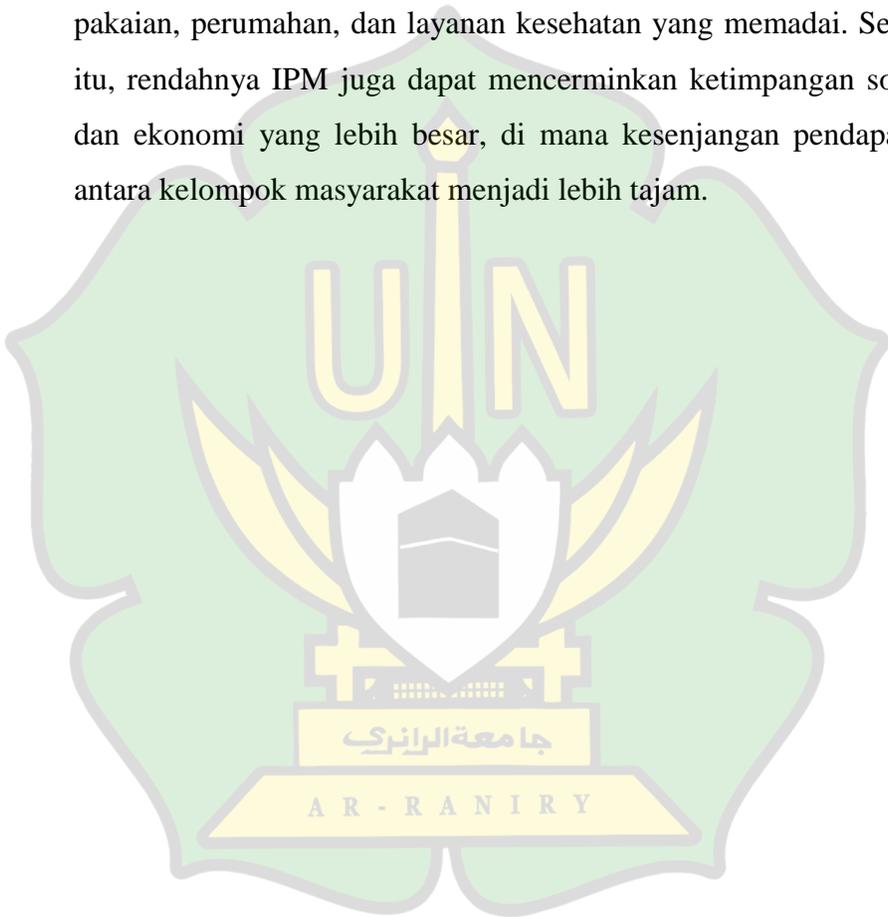
4.6.2 Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Hasil analisis regresi sebelumnya menunjukkan bahwa variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Koefisien variabel tersebut adalah -43.73607 , menandakan bahwa adanya peningkatan indeks pembangunan manusia akan berhubungan dengan penurunan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Lebih lanjut, nilai probabilitas untuk variabel indeks pembangunan manusia adalah 0.0000 , yang berarti sangat kecil dan jauh lebih rendah dari tingkat signifikansi α yang telah ditentukan (0.05). Dengan demikian, berdasarkan hasil uji signifikansi ini, hipotesis

nol (H_0) yang menyatakan tidak ada pengaruh antara indeks pembangunan manusia dan kemiskinan ditolak, dan hipotesis alternatif (H_1) yang menyatakan adanya pengaruh negatif diterima. Hal ini memberikan bukti kuat bahwa upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh akan berkontribusi dalam mengurangi tingkat kemiskinan, sehingga perlu diberikan perhatian dan kebijakan yang tepat untuk mendorong pembangunan manusia yang lebih baik sebagai bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Trisno (2022) Secara parsial variable kemiskinan mempunyai pengaruh yang negative dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan penelitian Fadila (2020) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian berkaitan juga peneliti (Bahriyah, 2022) menyatakan dengan kemiskinan memengaruhi secara negatif serta signifikan terhadap IPM. Hubungan negatif antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan kemiskinan menunjukkan bahwa semakin rendah IPM suatu wilayah atau negara, kemungkinan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut akan lebih tinggi. IPM mengukur kesejahteraan dan perkembangan manusia dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup yang panjang, akses terhadap pendidikan yang baik, dan pendapatan per kapita yang layak. Jika

IPM rendah, artinya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi lebih terbatas, sehingga masyarakat lebih rentan terhadap kemiskinan. Individu mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pakaian, perumahan, dan layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, rendahnya IPM juga dapat mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar, di mana kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat menjadi lebih tajam.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus (Otsus) memiliki nilai koefisien sebesar -7.118302 dengan arah yang negatif. Selain itu, nilai probabilitas untuk variabel ini adalah 0.0000 , yang kurang dari tingkat signifikansi α (0.05). Hal ini berarti, berdasarkan hasil tersebut, hipotesis alternatif (H_1) diterima, dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa data Otsus memiliki pengaruh yang signifikan dan berarah negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Artinya, Dana Otonomi Khusus secara efektif berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut dan memberikan dampak negatif terhadap angka kemiskinan.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki nilai koefisien sebesar -43.73607 , menunjukkan arah yang negatif. Selain itu, nilai probabilitas untuk variabel ini adalah 0.000 , yang lebih kecil dari tingkat signifikansi α (0.05). Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (H_1) diterima, dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Artinya, IPM memiliki pengaruh yang signifikan

dan arah yang negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi IPM di suatu wilayah, kemungkinan tingkat kemiskinan akan lebih rendah.

3. Variabel Otonomi Khusus (Otsus) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, hal ini diperlihatkan oleh hasil Uji F-statistik dengan nilai sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Oleh karena itu, hipotesis alternatif (H1) diterima, sedangkan hipotesis nol (H0) ditolak. Artinya, adanya keterlibatan Otsus dan tingkat IPM secara bersama-sama berperan penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan, dan hasil ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut saling berhubungan dalam menyumbang pada kondisi kemiskinan di wilayah.

5.2 Saran

1. Pemerintah dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara implementasi Otonomi Khusus (Otsus) dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertama, pemerintah dapat memastikan bahwa dana dan sumber daya yang dialokasikan melalui Otsus digunakan dengan efisien dan tepat sasaran untuk memperkuat infrastruktur dan layanan dasar di wilayah yang rentan kemiskinan. Selain itu, penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan

melalui Otsus dapat membantu meningkatkan IPM di wilayah tersebut. Kedua, pemerintah harus mengadopsi pendekatan berbasis data dan analisis untuk mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari segi Otsus maupun peningkatan IPM. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merancang program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengatasi kemiskinan.

2. Lembaga terkait, penting untuk fokus pada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola Otonomi Khusus (Otsus) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) guna mengatasi masalah kemiskinan. Pertama, lembaga terkait harus memperkuat kerja sama dan komunikasi antar-pihak terkait untuk mengoptimalkan alokasi dana dan sumber daya yang diperoleh melalui Otsus dengan memprioritaskan program-program yang berfokus pada peningkatan IPM.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian tentang kemiskinan adalah untuk memperluas cakupan variabel yang dipertimbangkan. Selain mengkaji faktor-faktor ekonomi dan sosial yang terkait dengan kemiskinan, disarankan untuk juga melibatkan aspek-aspek lain yang dapat memengaruhi kondisi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikhsan, and Ulung Pribadi. (2015). "Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Terhadap Pengurangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh." *Journal of Governance and Public Policy* 2.1.
- Kadafi, Muhammad, and Murtala Murtala. (2020): "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2010-2017." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 3.2 ,23-31.
- Nugroho, I., & Dahuri, I. (2012). *Pembangunan Wilayah: Perspektif ekonomi, sosial, dan lingkungan* (second ed). LP3ES
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan, Jilid 1 (Alih Bahasa: Haris Munandar dan Puji AL). Penerbit Erlangga
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Kemiskinan*, (online, <http://www.bps.go.id/> diakses 10 April 2020)
- Baihaqi, Ahmad Briezy, and Puspitasari Puspitasari. (2020): "Analisis dampak pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, zakat dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh." *Journal Publicuho* 3.2: 177-192.
- Ikhsan. (2015) *Relasi Otonomi Khusus Dan Pengurangan Kemiskinan Di Provinsi Aceh. Jurnal Public Policy*, , 1.1.
- Fahlevi, (2020) *Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Berdasarkan Dana Otonomi Khusus dan Pengeluaran Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2012-2016. EKONOMI SYARIAH*, 1.1: 21-28.

- Maipita, (2013) Indra. *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Absolute Media,
- Luthfi, A, (2012) Impact of Aceh's Additional Budget From Special Autonomy Oil-Gas Revenue Sharing Fund to Poverty Reduction in Aceh, Aceh: *ICAIOS's Journal*
- Bahriyah, M., & Primandhana, W. P. (2022). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ipm Di Kabupaten Gresik. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 8(1), 32.
- Fadila, R., & Marwan, M. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2013-2018. *Jurnal Ecogen*, 3(1), 120.
- Juliarni, A., & Hatmoko, A. W. (2020). Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Tanah Papua (pp. 335–339). pp. 335–339.
- Perdana, I. H & Saleh, S. (2022). Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Tahun 2015-2020. *Jurnal Ekonomi UGM*, 19(02), 162–172.
- Sakinah, (2021). Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus Indeks Pembangunan Manusia dan Zakat Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Skripsi. UIN Ar-Raniry*.
- Tahan Upoyo Trisno, Munajat, & Yetty Oktarina. (2021). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di

Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020. *Jurnal Bakti Agribisnis*, 7(02), 25–32.

Trisno, T. U., Munajat, & Oktarina, Y. (2021). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2020. *Jurnal Bakti Agribisnis*, 7(02), 25–32.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Data penelitian Otonomi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan

Tahun	Kabupaten/Kota	Otsus (X1)	IPM (X2)	Kemiskinan (Y)
2020	Kab. Aceh Barat	94,833,223,328	71.38	18.34
2021	Kab. Aceh Barat	91,335,538,751	71.67	18.81
2022	Kab. Aceh Barat	92,525,880,584	72.34	17.93
2020	Kab. Aceh Besar	111,739,148,308	73.56	13.84
2021	Kab. Aceh Besar	107,567,051,127	73.58	14.05
2022	Kab. Aceh Besar	110,740,056,141	74.00	13.38
2020	Kab. Aceh Selatan	107,999,879,481	67.12	12.87
2021	Kab. Aceh Selatan	104,050,761,715	67.44	13.18
2022	Kab. Aceh Selatan	103,766,244,092	67.87	12.43
2020	Kab. Aceh Singkil	84,815,780,821	68.94	20.20
2021	Kab. Aceh Singkil	81,816,638,749	69.22	20.36
2022	Kab. Aceh Singkil	81,925,172,451	69.62	19.18
2020	Kab. Aceh Tengah	105,626,988,128	73.24	15.08
2021	Kab. Aceh Tengah	102,039,234,614	73.37	15.26
2022	Kab. Aceh Tengah	104,762,109,693	73.95	14.50
2020	Kab. Aceh Tenggara	106,152,997,420	69.37	13.21
2021	Kab. Aceh Tenggara	102,431,397,283	69.44	13.41
2022	Kab. Aceh Tenggara	103,328,235,393	70.32	12.83
2020	Kab. Aceh Timur	131,502,316,016	67.63	14.08
2021	Kab. Aceh Timur	126,105,718,271	67.83	14.45
2022	Kab. Aceh Timur	126,228,540,615	68.72	13.91
2020	Kab. Aceh Utara	128,240,143,852	69.33	17.02
2021	Kab. Aceh Utara	123,441,599,992	69.46	17.43
2022	Kab. Aceh Utara	124,374,203,098	70.22	16.86
2020	Kab. Bireuen	109,671,369,591	72.28	13.06
2021	Kab. Bireuen	105,766,928,324	72.33	13.25
2022	Kab. Bireuen	107,517,178,631	73.16	12.51
2020	Kab. Pidie	118,296,013,637	70.63	19.23
2021	Kab. Pidie	113,890,035,074	70.70	19.59
2022	Kab. Pidie	115,061,354,804	71.20	18.79
2020	Kab. Simeulue	83,198,500,486	66.03	18.49
2021	Kab. Simeulue	80,213,911,061	66.41	18.98

2022	Kab. Simeulue	79,132,438,367	67.27	18.37
2020	Kota Banda Aceh	112,174,533,540	85.41	6.90
2021	Kota Banda Aceh	108,204,473,126	85.71	7.61
2022	Kota Banda Aceh	116,112,173,095	86.28	7.13
2020	Kota Sabang	66,067,662,980	75.78	14.94
2021	Kota Sabang	63,583,498,211	76.11	15.32
2022	Kota Sabang	66,532,235,190	76.85	14.66
2020	Kota Langsa	77,293,615,854	77.17	10.44
2021	Kota Langsa	74,610,273,820	77.44	10.96
2022	Kota Langsa	78,177,929,978	77.82	10.62
2020	Kota Lhokseumawe	77,603,295,272	77.31	10.80
2021	Kota Lhokseumawe	74,560,843,857	77.57	11.16
2022	Kota Lhokseumawe	78,493,551,332	78.04	10.84
2020	Kab. Nagan Raya	97,891,007,667	69.18	17.70
2021	Kab. Nagan Raya	94,368,230,519	69.31	18.23
2022	Kab. Nagan Raya	94,602,588,950	70.10	17.38
2020	Kab. Aceh Jaya	93,320,203,567	69.75	12.87
2021	Kab. Aceh Jaya	89,885,517,937	69.84	13.23
2022	Kab. Aceh Jaya	90,385,152,506	70.36	12.51
2020	Kab. Aceh Barat Daya	87,385,146,813	66.75	15.93
2021	Kab. Aceh Barat Daya	84,305,985,406	66.99	16.34
2022	Kab. Aceh Barat Daya	83,401,067,487	67.41	15.44
2020	Kab. Gayo Lues	104,452,731,190	67.22	19.32
2021	Kab. Gayo Lues	100,884,299,824	67.56	19.64
2022	Kab. Gayo Lues	100,691,899,572	68.25	18.87
2020	Kab. Aceh Tamiang	100,027,802,195	69.24	13.08
2021	Kab. Aceh Tamiang	96,580,429,129	69.48	13.34
2022	Kab. Aceh Tamiang	97,058,459,217	70.43	12.61
2020	Kab. Bener Meriah	86,327,851,222	72.98	18.89
2021	Kab. Bener Meriah	83,256,085,011	73.27	19.16
2022	Kab. Bener Meriah	85,089,627,141	73.90	18.29
2020	Kab. Pidie Jaya	80,850,532,828	73.20	19.19
2021	Kab. Pidie Jaya	77,743,397,148	73.60	19.55
2022	Kab. Pidie Jaya	79,723,939,131	74.34	18.45
2020	Kota Subulussalam	78,740,538,525	64.93	17.60
2021	Kota Subulussalam	75,748,486,633	65.27	17.65
2022	Kota Subulussalam	73,873,036,883	66.20	16.94

Lampiran 2 Common Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/26/23 Time: 12:30
 Sample: 2020 2022
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	253.4872	53.60640	4.728675	0.0000
LOGOTSUS	-3.807158	1.845870	-2.062528	0.0431
LOGIPM	-33.24782	5.267936	-6.311357	0.0000
R-squared	0.389205	Mean dependent var		15.34014
Adjusted R-squared	0.370696	S.D. dependent var		3.338484
S.E. of regression	2.648376	Akaike info criterion		4.828275
Sum squared resid	462.9172	Schwarz criterion		4.925410
Log likelihood	-163.5755	Hannan-Quinn criter.		4.866812
F-statistic	21.02792	Durbin-Watson stat		0.022612
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3 Fixed Effect Model

Dependent Variable: KEMISKINAN
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/26/23 Time: 12:31
 Sample: 2020 2022
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	430.4523	56.71991	7.589086	0.0000
LOGOTSUS	-8.277699	1.699782	-4.869860	0.0000
LOGIPM	-48.23837	5.754453	-8.382790	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996552	Mean dependent var	15.34014
Adjusted R-squared	0.994672	S.D. dependent var	3.338484
S.E. of regression	0.243690	Akaike info criterion	0.288880
Sum squared resid	2.612929	Schwarz criterion	1.098339
Log likelihood	15.03364	Hannan-Quinn criter.	0.610019
F-statistic	529.9337	Durbin-Watson stat	2.430789
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4 *Random Effect Model*

Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 12/26/23 Time: 12:32
Sample: 2020 2022
Periods included: 3
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 69
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	381.9339	48.66014	7.849010	0.0000
LOGOTSUS	-7.118302	1.502932	-4.736278	0.0000
LOGIPM	-43.73607	4.906648	-8.913636	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		2.764405	0.9923
Idiosyncratic random		0.243690	0.0077

A R - Weighted Statistics			
R-squared	0.556685	Mean dependent var	0.779728
Adjusted R-squared	0.543251	S.D. dependent var	0.362829
S.E. of regression	0.245211	Sum squared resid	3.968491
F-statistic	41.43913	Durbin-Watson stat	1.776315
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.328284	Mean dependent var	15.34014
Sum squared resid	509.0883	Durbin-Watson stat	0.013847

Lampiran 5 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	352.328206	(22,44)	0.0000
Cross-section Chi-square	357.218274	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: KEMISKINAN
Method: Panel Least Squares
Date: 12/26/23 Time: 12:34
Sample: 2020 2022
Periods included: 3
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	253.4872	53.60640	4.728675	0.0000
LOGOTSUS	-3.807158	1.845870	-2.062528	0.0431
LOGIPM	-33.24782	5.267936	-6.311357	0.0000

R-squared	0.389205	Mean dependent var	15.34014
Adjusted R-squared	0.370696	S.D. dependent var	3.338484
S.E. of regression	2.648376	Akaike info criterion	4.828275
Sum squared resid	462.9172	Schwarz criterion	4.925410
Log likelihood	-163.5755	Hannan-Quinn criter.	4.866812
F-statistic	21.02792	Durbin-Watson stat	0.022612
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.826769	2	0.2433

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
LOGOTSUS	-8.277699	-7.118302	0.630454	0.1442
LOGIPM	-48.238370	-43.736073	9.038532	0.1342

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 12/26/23 Time: 12:35

Sample: 2020 2022

Periods included: 3

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	430.4523	56.71991	7.589086	0.0000
LOGOTSUS	-8.277699	1.699782	-4.869860	0.0000
LOGIPM	-48.23837	5.754453	-8.382790	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.996552	Mean dependent var	15.34014
Adjusted R-squared	0.994672	S.D. dependent var	3.338484
S.E. of regression	0.243690	Akaike info criterion	0.288880
Sum squared resid	2.612929	Schwarz criterion	1.098339
Log likelihood	15.03364	Hannan-Quinn criter.	0.610019
F-statistic	529.9337	Durbin-Watson stat	2.430789
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 7 Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	67.57231 (0.0000)	1.311379 (0.2521)	68.88369 (0.0000)
Honda	8.220238 (0.0000)	-1.145154 --	5.002840 (0.0000)
King-Wu	8.220238 (0.0000)	-1.145154 --	1.276576 (0.1009)
Standardized Honda	8.755013 (0.0000)	-0.903326 --	1.995566 (0.0230)
Standardized King-Wu	8.755013 (0.0000)	-0.903326 --	-0.783184 --
Gourierioux, et al.*	--	--	67.57231 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	